

**Analisis Ketergantungan Republik Demokratik Kongo Terhadap Investasi
Tiongkok pada Sektor Pertambangan Tahun 2020-2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD RIZQI SHOBBAHIL MUBAAROK

22323283

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Ketergantungan Kongo Terhadap Investasi Tiongkok Pada Sektor
Pertambangan Tahun 2020-2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

11 Maret 2026,



Muhammad Rizqi Shobbahil Mubaarok

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	16
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	16
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	16
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	16
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II ANALISIS KETERGANTUNGAN KONGO TERHADAP EKSPOR KOMODITAS MENTAH	18
2.1. Ketergantungan Kongo Terhadap Sektor Ekspor Komoditas Mentah pada Tiongkok	18
2.2 Peran Pemerintahan Kongo dalam Mempertahankan Ketergantungan Ekspor Tradisional	31
BAB III ANALISIS KETERGANTUNGAN KONGO TERHADAP INVESTASI TIONGKOK	34
3.1 Ketergantungan Terhadap Investasi Asing yang Diakibatkan oleh Defisit Neraca Perdagangan	35
3.1.1 Ketergantungan Kongo yang Disebabkan oleh Pasar Internasional yang Monopolistik Sehingga terjadi Defisit	36
3.1.2 Dominasi Investasi Asing Tiongkok Dalam Industri Pertambangan Kongo	42
3.1.3 Investasi Asing sebagai Instrumen Penutup Defisit dan Pembangunan Infrastruktur Kongo	46

3.2 Monopoli Teknologi oleh Tiongkok Sebagai Negara Imperialis	50
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Jumlah Investasi Asing Langsung di Kongo.....	43
--	-----------

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Total Kepemilikan Kobalt Dunia Tahun 2018-2024	19
Grafik 2. 2 Grafik Tingkat Pengangguran Masyarakat Kongo	20
Grafik 2. 3 Proporsi Ekspor terhadap PDB Kongo	23
Grafik 2. 4 Impor Tembaga Tiongkok dari Kongo	27
Grafik 2. 5 Ekspor Kobalt Kongo Terhadap Tiongkok	29
Grafik 3. 1 Impor Kongo terhadap Tiongkok Pada Tahun 2023	39
Grafik 3. 2 Negara penerima Ekspor Kobalt Kongo	43
Grafik 3. 3 FDI Sebagai Penyumbang PDB Kongo	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Negara Tujuan Ekspor Kongo dan Komoditas Ekspor Kongo ke Tiongkok	25
--	-----------

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika ketergantungan ekonomi Republik Demokratik Kongo terhadap investasi Tiongkok pada sektor pertambangan dalam periode 2020-2025. Kongo memiliki sumber daya mineral yang melimpah, tetapi negara tersebut tidak mampu dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang menyebabkan Kongo menjadi salah satu negara miskin dan bergantung pada aktor eksternal. Penelitian ini menggunakan teori ketergantungan baru menurut Theotonio Dos Santos untuk menelaah hubungan bilateral antara Kongo dan Tiongkok merupakan hubungan kerja sama yang asimetris. Penelitian ini menyatakan bahwa hubungan bilateral ini mencerminkan bentuk ketergantungan baru melalui dominasi Tiongkok pada ekspor komoditas mentah, investasi asing langsung, serta penguasaan teknologi pada industri pertambangan. Sehingga menciptakan ketergantungan jangka panjang bagi Kongo terhadap modal dan teknologi yang berasal dari Tiongkok. Melalui beberapa skema kerja sama seperti perjanjian Sicominex dan kerja sama lainnya dengan Tiongkok, memosisikan Kongo sebagai penyedia bahan dengan nilai tambah yang rendah. Selain itu, Kongo sangat bergantung pada ekspor mineral mentah dalam memperoleh devisa, pendanaan dari Tiongkok dalam mengembangkan infrastruktur, dan teknologi yang dikendalikan oleh Tiongkok yang menyebabkan Kongo terjebak pada struktur ketergantungan modern dalam sistem ekonomi global.

Kata-kata Kunci: Investasi asing langsung, Ketergantungan Baru, Mineral, Republik Demokratik Kongo, Tiongkok.

ABSTRACT

This research analyses the dynamics of the Democratic Republic of Congo's economic dependence on Chinese investment in the mining sector in the 2020-2025 period. Congo has abundant mineral resources, but the country is unable to manage natural resources independently. This is due to limited technology and infrastructure which causes Congo to become a poor country and dependent on external actors. This research uses the new dependency theory according to Theotonio Dos Santos to examine the bilateral relationship between Congo and China, which is an asymmetric cooperative relationship. This research states that this bilateral relationship reflects a new form of dependence through China's dominance in raw commodity exports, foreign direct investment, and control of technology in the mining industry. Thus creating long-term dependence for Congo on capital and technology originating from China. Through several cooperation schemes such as the Sicominex agreement and other cooperation with China, Congo has positioned itself as a provider of materials with low added value. In addition, Congo is highly dependent on raw mineral exports to obtain foreign exchange, funding from China to develop infrastructure, and technology controlled by China which causes Congo to be trapped in the modern dependency structure in the global economic system.

Keywords: China, Democratic Republic of the Congo, Foreign Direct Investment, Minerals, New Dependence.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ketergantungan ekonomi yang terbentuk dalam hubungan investasi antara Republik Demokratik Kongo dengan Republik Rakyat Tiongkok. Penelitian ini menggunakan teori ketergantungan baru dengan tujuan untuk menelaah sejauh mana investasi Tiongkok telah membentuk pola relasi tidak setara yang melemahkan kedaulatan ekonomi Kongo, serta menciptakan struktur ketergantungan jangka panjang terhadap modal, teknologi, pengembangan infrastruktur, dan pasar global. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait dampak yang dialami Kongo dari kerja sama yang dilakukan antara Tiongkok dan Kongo dalam kurun waktu 2020-2025.

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang ditandai oleh peningkatan suhu rata-rata bumi serta perubahan pola cuaca jangka panjang akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang telah menyebabkan kenaikan suhu global dan peningkatan permukaan air laut sekitar 20 cm selama satu abad terakhir, sehingga menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan dan ancaman bagi kehidupan manusia (Rahayu 2024). Salah satu sektor dengan penyumbang emisi gas karbon adalah transportasi, di mana pada tahun 2023 transportasi telah menyumbang 25% emisi gas di kawasan Eropa dan mencapai 32% di Amerika Serikat. Tingginya angka tersebut dikarenakan penggunaan bahan bakar berbasis fosil sebagai sumber energi utamanya. Sehingga berdampak pada perubahan iklim dan mempercepat pemanasan global (Barman *et al.* 2023).

Kekhawatiran yang semakin mendalam terhadap keselamatan lingkungan hidup telah mendorong berbagai negara untuk melakukan transisi energi dengan jejak karbon rendah dalam mencegah terjadinya krisis iklim. Hal ini membuat industri otomotif mulai mengambil langkah konkret menuju netralitas karbon global melalui produksi *electric vehicle* (EV) yang ramah terhadap lingkungan. Secara global, penjualan *EV* telah meningkat dengan pesat pada beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 penjualan kendaraan listrik mencapai 6,6 juta unit. Pasar ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan listrik yang berasal dari Tiongkok, di mana Tiongkok telah menyumbang setengah dari penjualan kendaraan listrik pada pasar global. Peralihan tren transportasi ini diperkirakan akan meningkat mencapai 19 juta unit pada tahun 2030 (Barman *et al.* 2023). Selain pada pasar global, tren kenaikan kendaraan listrik di dalam negeri Tiongkok telah mengalami peningkatan sejak tahun 2020, di mana pada tahun 2020 penjualan kendaraan listrik hanya sekitar 1,2 juta unit dan mengalami peningkatan menjadi 9,3 juta unit kendaraan terjual pada tahun 2024 (Bloomberg 2024).

Dominasi Tiongkok dalam industri *EV* global tidak lepas dari peranan Republik Demokratik Kongo (Kongo), Kongo memegang peranan yang tidak dapat diabaikan sebagai salah satu jaringan rantai pasok kobalt bagi industri *EV* Tiongkok. keterkaitan antara Kongo dan Tiongkok dalam rantai pasok global *EV* berakar pada kekayaan sumber daya mineral yang melimpah yang dimiliki oleh Kongo, di mana pada tahun 2024 Kongo memiliki 72,1% cadangan kobalt global dan secara konsisten menjadi produsen kobalt terbesar di dunia sepanjang periode 2018 hingga 2024 (Alonso, Brioché, Schult, *et al.* 2025, 5–6). Selain itu, Kongo memiliki cadangan tembaga sebesar 43,69 juta ton yang membuat posisi Kongo

sebagai pemasok bahan baku industri ev Tiongkok menjadikannya mitra strategis yang tidak dapat tergantikan (Zhen 2025). Akan tetapi, hubungan bilateral kedua negara ini memiliki implikasi yang jauh melampaui dimensi ekonomi semata, sehingga membentuk pola hubungan ketergantungan antara Kongo dengan Tiongkok pada sektor pertambangan mineral.

Namun dibalik kekayaan sumber daya mineral yang melimpah tersebut, tidak dapat membuat kesejahteraan bagi negara Kongo. Hal ini dikarenakan Kongo tidak memiliki kapasitas teknologi maupun infrastruktur industri yang memadai untuk mengolah mineralnya secara mandiri, di mana hampir seluruh mineral mentah diekspor dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Paradoks ini menyebabkan Kongo sebagai negara yang kaya akan mineral namun tetap terjebak sebagai negara miskin secara ekonomi (Utama, Rosyidin, and Wahyudi 2022).

Ketidakmampuan Kongo tersebut tidak luput dari perhatian Tiongkok, sejak awal abad ke-21 Tiongkok telah memposisikan diri sebagai mitra strategis jangka panjang bagi negara-negara Afrika yang kaya akan sumber daya. Fondasi hubungan bilateral Tiongkok di Kongo berawal melalui kesepakatan MOU (memorandum of understanding) perjanjian Sicominex (Sino Congolaise des Mines) yang menghasilkan perusahaan Joint Venture dengan kepemilikan saham 68% oleh pihak Tiongkok dan 32% oleh pihak Kongo pada 17 September tahun 2007. Tiongkok menawarkan skema investasi yang bernama resource for infrastructure (RFI) di mana Tiongkok berkomitmen akan berinvestasi di Kongo dengan nilai sebesar 6,57 miliar Amerika dolar untuk pembangunan infrastruktur dan pertambangan, sebagai

imbalan atas hak pengelolaan kobalt dan tembaga yang telah diberikan oleh Kongo (Jansson 2011).

Perjanjian Sicominer menjadi pintu masuk bagi dominasi Tiongkok yang terus mengakar hingga saat ini, Tiongkok telah mengendalikan sekitar 60% operasi pertambangan di Kongo dan 67,5% produksi kobalt Tiongkok di pasar global bersumber langsung dari Kongo. Skala dominasi ini diperkuat oleh besarnya arus investasi yang mengalir dari Tiongkok di Kongo dengan nilai sebesar 13,3 miliar Amerika dolar (CIDOB 2023). Memasuki periode 2020 hingga 2025, hubungan antara kedua negara terjalin semakin erat, ditandai dengan bergabungnya Kongo dengan kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) pada 6 Januari 2021. Hubungan yang semakin erat tersebut didorong dengan komitmen Tiongkok dalam persidangan PBB yang diselenggarakan pada 22 September tahun 2020. Tiongkok berupaya untuk mengurangi emisi gas karbon yang secara langsung mendorong percepatan produksi kendaraan listrik dan infrastruktur penyimpanan energi dalam skala besar (Zhao *et al.* 2022).

Hal ini menyebabkan, kebutuhan Tiongkok terhadap kobalt dan tembaga meningkat, menjadikan Kongo semakin tak tergantikan bagi rantai industri energi terbarukan Tiongkok. Akan tetapi, dibalik intensitas hubungan ekonomi tersebut menyebabkan ketimpangan struktural bagi Kongo. Pertumbuhan ekspor mineral yang meningkat pesat sejak tahun 2020 hingga 2025 ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kongo (Kurniawan 2023). Kekayaan sumber daya yang dimiliki Kongo justru lebih banyak dirasakan oleh pihak Tiongkok. Hal ini tidak terlepas dari posisi Kongo yang sejak awal hanya

berperan sebagai pemasok bahan mentah, sementara seluruh proses pengolahan dan hilirisasi berlangsung di Tiongkok.

Ketidakmampuan Kongo dalam menjalankan industri mineralnya secara mandiri menjadikannya sangat bergantung pada modal, teknologi, dan pasar yang telah dikendalikan oleh pihak Tiongkok. Selain itu, ketidakmampuan Kongo dalam menjalankan industrinya secara mandiri menyebabkan lemahnya kapasitas fiskal dan tingginya kebutuhan pendanaan infrastruktur membuat pemerintah Kongo berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan investor utamanya, yaitu Tiongkok. Akibatnya Kongo semakin bergantung pada keterlibatan Tiongkok di sektor pertambangan, yang menyebabkan kendali akan pengelolaan sumber daya mineral Kongo berada di pihak Tiongkok (Endaylalu 2018). Kondisi inilah yang membentuk pola hubungan ketergantungan Kongo terhadap investasi yang diberikan oleh Tiongkok.

Meskipun hubungan tersebut dapat dikatakan kerja sama strategis, akan tetapi pada tahun 2025 Kongo mengeluarkan kebijakan penghentian sementara ekspor kobaltnya untuk keluar dari ketergantungan yang tercipta sejak lama terhadap Tiongkok. Akan tetapi, kebijakan ini berpotensi merugikan Kongo, karena dapat mengganggu pemasukan devisa yang selama ini bertumpu pada ekspor hasil pertambangan. Dalam merespons kebijakan tersebut, Tiongkok mempercepat diversifikasi sumber pasokan dan pengembangan baterai berbasis litium (Dewi 2025). Sehingga menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara kedua negara bersifat asimetris, di mana Kongo bergantung pada pasar Tiongkok sebagai pembeli utama hasil pertambangannya, sementara Tiongkok memiliki alternatif lain dalam mengembangkan industrinya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk hubungan ketergantungan Kongo terhadap investasi Tiongkok pada sektor pertambangan dalam kurun tahun 2020-2025 menurut teori ketergantungan baru Theotonio Dos Santos?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui investasi Republik Rakyat Tiongkok di Republik Demokratik Kongo, dengan menjelaskan dan menganalisis bentuk-bentuk investasi dan implementasi antara Tiongkok dan Kongo.
2. Untuk mengetahui dampak investasi Tiongkok terhadap kedaulatan ekonomi Kongo, dengan menilai sejauh mana kerja sama ini memperkuat dan menguntungkan Kongo atau melemahkan kedaulatan Kongo dalam mengelola sumber dayanya sendiri sehingga menimbulkan ketergantungan Kongo terhadap Tiongkok.
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan dampak dari investasi Tiongkok terhadap Kongo, sehingga dapat memahami bentuk-bentuk ketergantungan struktural yang muncul dari investasi tersebut, baik dari teknologi, modal, penguasaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur Kongo.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada investasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Kongo dan timbal balik yang diberikan Kongo untuk Tiongkok dalam kurun waktu 2020-2025. Tahun 2020 menjadi titik awal Tiongkok dalam meningkatkan investasi terhadap Kongo. Terbukti pada tahun 2020 Tiongkok telah

menghapus hutang Kongo senilai 28 juta Amerika dolar dan memberikan bantuan dana sebesar 18 juta Amerika dolar kepada Kongo (Nazar 2021). Penghapusan hutang dan bantuan yang dilakukan oleh Tiongkok ditujukan untuk berinvestasi lebih dalam pada industri tembaga dan kobalt di Kongo yang bertujuan bagi industri dalam negeri Tiongkok sebagai bahan teknologi baterai dan transisi energi terbarukan. Sejalan dengan investasi ini pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-75 pada 22 September 2020, Presiden China Xi Jinping mengumumkan target jangka panjang yang konkret untuk mengurangi emisi karbon sebelum 2030 dan mencapai netralitas karbon sebelum 2060 (Zhao *et al.* 2022). Selain itu penelitian ini akan menjelaskan mengenai hubungan kerja sama Tiongkok dan Kongo yang awalnya bersifat saling menguntungkan menjadi hubungan ketergantungan struktural Kongo pada modal, teknologi, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya yang dikendalikan oleh pihak Tiongkok.

1.5 Tinjauan Pustaka

Upaya untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan berkorelasi, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam menulis penelitian. Penelitian-penelitian yang penulis maksud memiliki relevansi yang sama dengan penelitian yang dibahas oleh penulis dengan topik ketergantungan negara-negara tertinggal terhadap negara maju dalam mengembangkan ekonomi negaranya. Selain itu, rujukan tersebut penulis gunakan untuk mencari celah dalam penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk melengkapi celah penelitian sebelumnya.

Dalam *Policy Brief* yang ditulis oleh Marcus vinicius de Freitas yang berjudul “The Impact of Chinese Investments in Africa: Neocolonialism or

Cooperation?” (Freitas 2023). Pada penelitian ini membahas Investasi Tiongkok di Afrika lebih bersifat kooperatif dan saling menguntungkan daripada bentuk neokolonialisme baru. Hal ini dikarenakan investasi Tiongkok telah membawa perbaikan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Afrika, meningkatkan konektivitas dan diversifikasi ekonomi.

Selain itu, pinjaman yang ditawarkan oleh Tiongkok memiliki suku bunga rendah dan jangka waktu yang panjang, sehingga tidak mempersulit negara-negara di Afrika. Meskipun terdapat kritik mengenai jebakan utang dan ketergantungan ekonomi, Tiongkok tidak berusaha mengeksport model pemerintahannya, tidak membangun jaringan negara yang terikat untuk memasok sumber daya atau lokasi pangkalan militer, dan telah memberikan dampak positif yang signifikan melalui kerja sama yang saling menguntungkan tanpa campur tangan dalam urusan domestik. Akan tetapi, penelitian ini memiliki gap yaitu kurangnya pemeriksaan yang lebih kritis dan mendalam yang dapat memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar saling menguntungkan dari perspektif negara-negara Afrika (Freitas 2023).

Berbeda hal dengan *Policy brief* yang ditulis oleh Marcus vinicius de Freitas, Penelitian yang dilakukan oleh Denta Utama, Mohamad Rosyidin, dan Fendy Eko Wahyudi dengan judul “Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt dalam Kerjasama” dalam *journal of international relations* mengemukakan bahwa bahwasanya kehadiran *Huayou Cobalt* perusahaan yang berasal dari Tiongkok menciptakan pola kerja sama yang tidak setara. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan Kongo dalam mengatasi permasalahan domestiknya, Sehingga dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk mengambil keuntungan yang sangat

besar dan menciptakan kerja sama yang tidak seimbang. Pinjaman yang ditawarkan oleh Tiongkok sebagai bentuk investasi dalam membangun infrastruktur negara Kongo menimbulkan permasalahan yang baru yakni membengkaknya hutang Kongo kepada Tiongkok sehingga menimbulkan perangkap bagi Kongo terhadap investasi Tiongkok (Utama, Rosyidin, and Wahyudi 2022).

Ditinjau dari substansi dalam penelitian tersebut, Penelitian tersebut berfokus pada alasan mengapa Kongo tidak dapat melepaskan diri dari investasi Tiongkok yang diberikan sebagai imbalan atas hak penambangan. Selain itu, penelitian tersebut bertujuan untuk memahami secara mendalam keterlibatan perusahaan multinasional sebagai peran sentral dalam dominasi Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan sumber dayanya dan memaksimalkan keuntungan bagi Tiongkok. Akan tetapi, penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci mekanisme bagaimana ketergantungan ini terbentuk dan dipertahankan sehingga investasi yang dilakukan Tiongkok menyebabkan ketergantungan kepada pihak Kongo (Utama, Rosyidin, and Wahyudi 2022).

Penggunaan teori ketergantungan dalam penulisan ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Yeni Herliani Yoshida dengan judul penulisan “Ketergantungan Laos Pada Tiongkok Dalam Ekonomi Dan Pembangunan Sebagai Penghambat Terlaksananya Program Reduce Inequality” (Yoshida 2022). Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan teori ketergantungan untuk mengukur seberapa jauh ketergantungan negara Laos terhadap perekonomian Tiongkok. Teori itu digunakan karena mengacu pada pendapat Dos Santos yang mengemukakan bahwa tidak ada negara yang otonom di dunia sehingga perkembangan suatu negara

tidak terjadi secara mandiri melainkan butuh negara lain untuk turut andil. Dinamika dan impuls perkembangan tidak berasal dari negara pinggiran. Hal tersebut dikarenakan ekonomi negara negara pinggiran tidak dapat menyamai negara maju (Santos 1970).

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ketergantungan Laos dalam bidang ekonomi dan pembangunan menyebabkan utang luar negeri yang dimiliki oleh Laos terhadap Tiongkok membengkak. Lebih lanjut, Ekonomi Negara Laos sangat ditentukan oleh ekonomi negara Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan pada saat perkembangan ekonomi Laos pada tahun 1986 dilaksanakan ekonomi yang mengarah pada pembentukan distribusi nasional dan redistribusi pendapatan. Pada saat itu para pemimpin Laos sangat terkesima dengan perkembangan Tiongkok yang begitu cepat dan berasumsi bahwa akan berpengaruh pada perkembangan negaranya sendiri (Yoshida 2022).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan kerja sama antara Tiongkok dan negara-negara tertinggal menunjukkan adanya dualitas pandangan yang kontras. Di satu sisi, banyak penelitian yang berargumen bahwa kehadiran Tiongkok sebagai mitra strategis membawa keuntungan signifikan dan saling menguntungkan. Kehadiran Tiongkok dilihat sebagai solusi atas tantangan pembangunan, karena investasi dan proyek-proyek yang dibentuk dinilai efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan modernisasi infrastruktur vital. Keberhasilan pembangunan ini mencakup peningkatan konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi yang sebelumnya sulit diwujudkan. Namun, di sisi lain, pandangan kritis muncul yang menyoroti bahwa kerja sama tersebut justru cenderung mengarah pada ketidaksetaraan dan eksploitasi.

Meskipun Tiongkok menyediakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, keuntungan dari proyek-proyek ini sering kali timpang, Di mana Tiongkok memperoleh manfaat yang jauh lebih besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan lokal.

Secara keseluruhan, kajian terdahulu yang disajikan di atas hanya membahas dampak positif maupun negatif Tiongkok sebagai mitra alternatif negara barat namun, tidak membahas mengenai bagaimana kehadiran Tiongkok menciptakan ketergantungan kepada negara tertinggal. Selain itu fokus dalam penelitian terdahulu terlalu sempit, tidak menjelaskan terperangkapnya negara tertinggal merupakan bentuk ketergantungan negara terbelakang dengan Tiongkok. Oleh karena itu, untuk menutup celah kajian terdahulu, penelitian ini akan membahas bagaimana pola ketergantungan Kongo terhadap Tiongkok terbentuk menggunakan teori ketergantungan. Sehingga dapat menjelaskan secara rinci apakah ketergantungan ini merugikan Kongo dan dominasi Tiongkok membuat melemahnya kedaulatan Kongo sehingga dapat dikatakan sebagai neo-kolonialisme.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori ketergantungan baru menurut Theotonio Dos Santos dalam jurnal berjudul “The Structure of Dependence”. Santos (1970) menjelaskan bahwa negara-negara tertinggal (periphery) tetap berada dalam posisi lemah dibandingkan negara-negara maju atau inti (core) melalui mekanisme ekonomi modern, bukan dengan kolonialisme. Ketergantungan baru hadir setelah Perang Dunia II, di mana ekonomi negara berkembang atau tertinggal sepenuhnya terikat pada struktur pasar internasional yang dikuasai oleh negara inti dan

perusahaan multinasional. Selain itu negara tertinggal lemah pada sektor industri, dikarenakan perekonomian negara tertinggal bergantung pada sektor ekspor dalam memenuhi industri dalam negeri. Permasalahan ini muncul karena negara tertinggal tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan industri secara mandiri, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan negara inti (Santos 1970).

Menurut Santos, ketergantungan baru terjadi karena negara-negara tertinggal memiliki struktur ekonomi yang lemah sehingga tidak mampu mengembangkan industri dalam negerinya. Ketidakmampuan tersebut membuat mereka bergantung pada devisa ekspor komoditas mentah untuk membiayai impor bahan baku, mesin, dan peralatan industri yang berasal dari negara maju. Kelemahan struktural ini kemudian dimanfaatkan oleh negara maju dengan memonopoli teknologi, di mana inovasi dan teknologi tidak diperdagangkan secara bebas, melainkan disalurkan melalui perusahaan multinasional dengan lisensi dan royalti yang tinggi. Monopoli tersebut menciptakan hambatan bagi negara tertinggal untuk membangun kapasitas industri mereka secara mandiri, sehingga memaksa negara tertinggal untuk bergantung pada investasi asing sebagai satu-satunya sumber pendanaan industri dalam negeri. Dengan demikian, pembangunan negara tertinggal akhirnya berada di bawah kontrol kepentingan eksternal, yang memperdalam struktur ketergantungan dalam sistem ekonomi global (Santos 1970).

Penelitian ini menggunakan tiga bentuk ketergantungan yang dijelaskan oleh Santos, Santos mengidentifikasi tiga bentuk utama dalam menjelaskan ketergantungan baru.

1. Pertama, ketergantungan pada sektor ekspor komoditas mentah atau tradisional sebagai satu-satunya sumber perolehan devisa yang akan digunakan untuk membeli bahan baku dan mesin-mesin industri dari negara pusat. Akan tetapi ketergantungan ini membatasi negara tertinggal dalam mengembangkan pasar domestik, sehingga tetap mempertahankan industri yang bersifat ekstraktif. Selain itu, ketergantungan ini dipengaruhi oleh dominasi oligarki yang melanggengkan industri ekstraktif, sehingga menghambat terjadinya transformasi struktural (Santos 1970).
2. Kedua, perkembangan industri negara tertinggal sangat dipengaruhi oleh fluktuasi neraca pembayaran. Negara-negara tertinggal mengalami defisit akibat hubungan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan defisit:
 - a. Menurut Santos, salah satu penyebab utama defisit neraca pembayaran di negara-negara berkembang adalah struktur pasar internasional yang bersifat monopolistik, yang menekan harga bahan baku sekaligus meningkatkan harga produk industri, sehingga negara-negara tertinggal cenderung mengekspor bahan mentah dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan harga produk jadi dan teknologi yang harus mereka impor (Santos 1970).
 - b. Santos menjelaskan bahwa penyebab kedua dari defisit bersumber dari dominasi modal asing pada sektor perekonomian unggulan seperti mineral yang menyebabkan volume keuntungan lebih banyak diterima oleh negara investor, karena keuntungan lebih tinggi dibandingkan nilai investasi yang ditanamkan. Selain itu, defisit

kerap terjadi karena negara tertinggal tetap menanggung biaya tambahan seperti pembayaran tenaga ahli asing atau biaya jasa pengiriman bahan mentah ke pasar tujuan (Santos 1970).

- c. Santos menjelaskan bahwa terjadinya ketergantungan pada pendanaan dan bantuan asing sering kali muncul sebagai konsekuensi dari defisit struktural dalam perekonomian mereka. Defisit tersebut mendorong negara-negara tertinggal untuk mengandalkan sumber pembiayaan eksternal, baik dalam bentuk investasi asing maupun pinjaman luar negeri, pendanaan ini digunakan untuk menutup defisit dan membiayai pembangunan. Namun, dalam praktiknya hubungan ini justru memperkuat siklus ketergantungan, karena sebagian besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut kembali mengalir ke negara investor. Akibatnya, negara berkembang kembali membutuhkan pendanaan asing baru untuk menutup kebutuhan dan semakin bergantung pada pendanaan asing dalam memenuhi neraca ekonomi negaranya (Santos 1970).

3. Ketiga, ketergantungan pada teknologi karena negara tertinggal tidak memiliki akses bebas terhadap teknologi modern. Perusahaan multinasional dan negara inti memonopoli teknologi dan hanya memberikannya melalui mekanisme investasi, lisensi, atau royalti yang tinggi. Sehingga negara tertinggal tidak mampu memiliki teknologi dan sulit membangun kapasitas industri nasional secara mandiri (Santos 1970).

Hubungan Kongo dan Tiongkok mencerminkan konsep ketergantungan baru, di mana Kongo yang memiliki cadangan kobalt dan tembaga terbesar di dunia sangat bergantung pada investasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Tiongkok mendominasi dan menguasai sebagian besar operasi tambang dan keuntungan utama didapatkan oleh Tiongkok. Sementara Kongo bergantung pada modal dan teknologi yang menyebabkan Kongo terlilit hutang dengan bunga yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan hubungan kerja sama bilateral ini menunjukkan hubungan ketergantungan pada sektor ekspor, modal, dan teknologi yang memperkuat dominasi Tiongkok dan melemahkan posisi kedaulatan Kongo pada sistem ekonomi global.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini menyatakan bahwa hubungan Kongo dengan Tiongkok merupakan hubungan ketergantungan yang dapat dijelaskan menggunakan teori ketergantungan baru menurut Theotonio Dos Santos. Pertama ketergantungan pada sektor ekspor, di mana industri Kongo berpusat pada ekspor kobalt dengan harga rendah yang telah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan industri Tiongkok, sehingga menghambat pertumbuhan pasar domestik Kongo. Kedua, Kongo sangat bergantung pada bantuan asing dari Tiongkok, terlihat dari dominasi investasi perusahaan Tiongkok dalam pembiayaan dan pengelolaan tambang yang menyebabkan mayoritas keuntungan mengalir ke Tiongkok yang menyebabkan defisit bagi pihak Kongo. Terakhir yaitu ketergantungan pada teknologi, di mana penguasaan teknologi pertambangan dan pengelolaan mineral sepenuhnya dimiliki oleh Tiongkok, membuat Kongo harus membayar royalti dan paten tanpa pernah memiliki teknologi tersebut. Dengan demikian menunjukkan bahwa hubungan

bilateral ini merupakan hubungan ketergantungan ekonomi modern yang dapat merugikan Kongo dalam jangka panjang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan pendekatan ini untuk menganalisis studi kasus yang holistik dan mendalam terhadap suatu fenomena kontekstual yang nyata (Creswell *and* Poth 2023). Sehingga peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis studi kasus yang ada dalam menjelaskan ketergantungan Kongo terhadap investasi Tiongkok pada tahun 2020-2025.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah investasi Tiongkok di Kongo. Sedangkan objek yang diteliti adalah ketergantungan Kongo terhadap Investasi Tiongkok.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dalam menjelaskan ketergantungan Kongo terhadap investasi Tiongkok. Sehingga, sumber data diperoleh dari menganalisis buku, jurnal, laporan dan berita yang sudah dipastikan kebenarannya.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga tahapan dalam proses pengolahan data untuk menganalisis literatur yang relevan (Miles *and* Huberman 1994, 1–2). Tahapan pertama pengumpulan data literatur, kemudian penulis memilih, menyusun, dan memfokuskan data untuk dapat digunakan dalam penelitian. Tahapan kedua, data yang terkumpul akan dianalisis untuk menentukan

bagian-bagian dalam penelitian. Tahap terakhir, penulis akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diolah dan dianalisis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab utama:

- Bab pertama menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, kajian Pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua menjelaskan Ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah dan penguatan industri ekstraksi karena pemerintahan yang oligarki.
- Bab ketiga menjelaskan keterkaitan teori ketergantungan baru menurut Theotonio Dos Santos dengan ketergantungan Kongo terhadap investasi Tiongkok.
- Bab keempat menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini.

BAB II

ANALISIS KETERGANTUNGAN KONGO TERHADAP EKSPOR KOMODITAS MENTAH

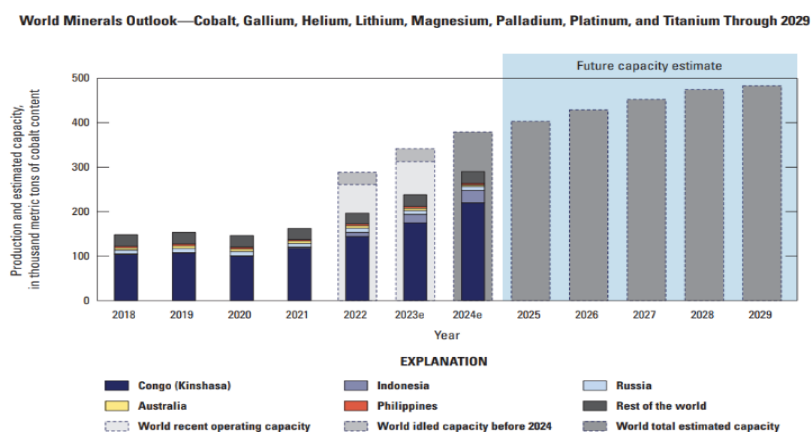
Salah satu bentuk ketergantungan baru (*new dependency*) sebagaimana dijelaskan oleh Theotonio Dos Santos, yaitu ketergantungan negara tertinggal terhadap ekspor komoditas mentah sebagai sumber utama perolehan devisa. Dalam kerangka ini, negara-negara tertinggal cenderung mengandalkan ekspor sumber daya alam atau komoditas tradisional untuk memperoleh pendapatan yang kemudian digunakan untuk mengimpor bahan baku, teknologi, serta mesin industri dari negara-negara pusat. Pola tersebut pada akhirnya membatasi kemampuan negara berkembang dalam mengembangkan industri domestik yang lebih beragam dan bernilai tambah tinggi. Ketergantungan yang berkelanjutan terhadap sektor ekstraktif juga sering diperkuat oleh dominasi kelompok elit politik tertentu yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan struktur ekonomi berbasis ekspor komoditas. Akibatnya, proses transformasi struktural menuju industrialisasi menjadi terhambat dan negara tertinggal seperti Kongo tetap berada dalam posisi subordinat dalam sistem ekonomi global (Santos 1970).

2.1. Ketergantungan Kongo Terhadap Sektor Ekspor Komoditas Mentah pada Tiongkok

Republik Demokratik Kongo (RDK) menggambarkan permasalahan kompleks ekonomi politik yang terjadi di dunia pada saat ini. Kongo merupakan negara terbesar di Afrika Sub-Sahara dengan cadangan mineral global yang tinggi, seperti kobalt, emas, berlian, timah, dan tembaga untuk menunjang kebutuhan

hidroelektrik, teknologi, baterai Listrik, komponen elektronik, dan transisi energi hijau industri global (World Bank 2025). Kobalt merupakan sumber daya paling penting bagi Kongo, diperkirakan 72,1% cadangan kobalt dunia berada pada negara tersebut (Alonso, Brioché, Schulte, *et al.* 2025, 5-6). Sebagai pemasok utama kobalt global Kongo mengalami permasalahan tersendiri. Di mana ekspor pada sektor mineral tersebut tidak menciptakan kemakmuran ekonomi bagi negara Kongo.

Grafik 2. 1Total Kepemilikan Kobalt Dunia Tahun 2018-2024



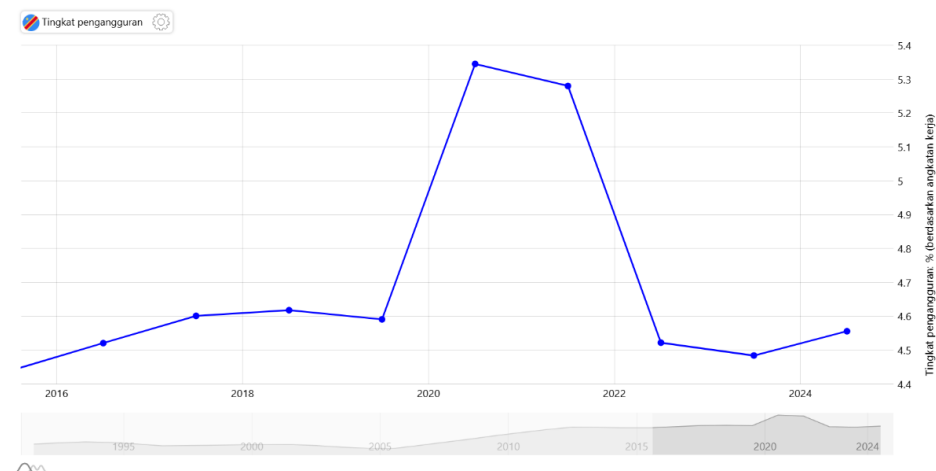
Sumber: USGS (2025)

Berdasarkan **Grafik 2.1** di atas RDK merupakan produsen kobalt terbesar di dunia dengan kontribusi yang sangat dominan terhadap total kapasitas produksi kobalt global. Terlihat dari total produksi yang dilakukan oleh Kongo sepanjang periode 2018 hingga 2024, Kongo secara konsisten menjadi produksi kobalt terbesar di dunia jauh melampaui negara produsen lainnya seperti Indonesia, Australia, Rusia, Filipina, dan negara lainnya (Alonso, Brioché, Schulte, *et al.* 2025, 5–6). Kenaikan kapasitas produksi tersebut tercermin pada tahun 2024 dengan estimasi mencapai lebih dari 220.000 metrik ton yang menunjukkan mayoritas produksi kobalt global di produksi oleh Kongo (ASA 2026). Kebutuhan industri global terhadap Kobalt dari Kongo semakin meningkat seiring tingginya

permintaan untuk baterai kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan yang membuat Kongo semakin diuntungkan pada industri global.

Meskipun Kongo memiliki peran penting dalam kebutuhan industri kobalt global, ketidakmampuan Kongo dalam mengelola negaranya tercerminkan dari tingginya angka kemiskinan warga negara Kongo. pada tahun 2023 Republik Demokratik Kongo menjadi negara termiskin ke-6 dengan tingkat kemiskinan 62% dimana warga negara Kongo memiliki pendapatan kurang dari 2,15 Dolar AS per hari (Kurniawan 2023). Besarnya tingkat kemiskinan di Kongo menyebabkan warga negara Kongo hidup dalam garis kemiskinan dan tingginya angka pengangguran, terutama di daerah pedesaan. Dengan angka kemiskinan yang besar tersebut menunjukkan kesenjangan yang tinggi dan perlu adanya tindakan dari pemerintahan Kongo, jika tidak segera dibenahi maka akan menghambat pembangunan manusia, menyulitkan warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan menyebabkan kemiskinan dalam jangka panjang.

Grafik 2. 2 Grafik Tingkat Pengangguran Masyarakat Kongo



Sumber: Luft Time (2024)

Dengan kekayaan yang melimpah, Kongo merupakan salah satu negara dengan tingkat pengangguran yang tergolong tinggi. Berdasarkan **Grafik 2.2** di atas, tingkat pengangguran di Kongo menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2015 hingga 2021, dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2020 mencapai 5,34% dan 2021 mencapai 5,28%, sebelum turun Kembali ke kisaran 4,5% pada tahun 2022 hingga 2024 (LUFT TIME 2024). Tingkat pengangguran tersebut sangat tinggi yang menyebabkan Kongo berada di peringkat 103 negara dengan tingkat pengangguran di dunia pada tahun 2024. Terutama jika dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh kongo seperti kobalt, tembaga, emas, dan koltan yang menjadi komoditas ekspor utama negara tersebut (OEC 2024).

Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan mendasar antara kekayaan sumber daya alam dan kemampuan negara dalam mengelola serta mendistribusikan manfaat ekonomi dari sektor pertambangan terhadap masyarakatnya. Tingginya angka pengangguran mencerminkan bahwa sektor pertambangan yang berada di Kongo belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai. Mayoritas kegiatan pertambangan dikuasai oleh Perusahaan asing yang cenderung menggunakan tenaga kerja terampil dari luar negeri yang menyebabkan tenaga kerja lokal menjadi sangat terbatas dan manfaat ekonomi dari sektor ini tidak sepenuhnya terserap oleh masyarakat Kongo.

Ketergantungan Kongo terhadap modal negara asing telah mengakar dari sejarah yang tertanam sejak awal kemerdekaannya pada 30 Juni 1960. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Santos mengenai ketergantungan baru, Kongo terjebak dalam pola ekonomi ekstraktif yang mengandalkan ekspor mineral mentah

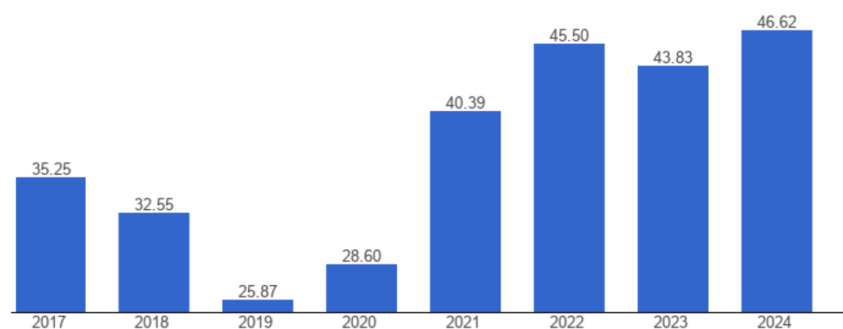
sebagai sumber pemasukan utama negara. Posisi Kongo sebagai negara periferi ditegaskan oleh dominasi dari negara penjajahnya, yaitu Belgia. Perusahaan yang bernama *Belgian Union Miniere du Haut-Katanga* menguasai tambang-tambang mineral Kongo dengan total aset mencapai 430 juta Amerika dolar pada tahun 1965, sehingga industri dalam negeri Kongo telah ditentukan sebagai pemasok mineral strategis bagi pasar global. Dengan ketidakmampuan Kongo dalam mengembangkan industrinya secara mandiri menyebabkan ketergantungan secara struktural pada ekspor komoditas mentah yang telah ditentukan oleh aktor eksternal yang tetap dipertahankan hingga saat ini. (Cordell *et al.* 2019).

Memasuki abad ke-21, pola ketergantungan Kongo mengalami transformasi melalui kemitraan strategis dengan Tiongkok sebagai salah satu negara yang memproduksi elektronik global. Transformasi ini tercipta melalui kerja sama bilateral melalui perjanjian Sicominex (Sino Congolaise des Mines) yang disepakati sejak penandatanganan MOU (memorandum of understanding) sejak 17 September 2007 dengan skema Resource for Infrastructure (RFI). Kerja sama tersebut menghasilkan perusahaan *Joint Venture* (JV) yang bernama Sicominex dengan kepemilikan saham sebesar 68% yang terdiri dari beberapa perusahaan Tiongkok seperti Sinohydro, CREC, dan Zhejiang Huayou Cobalt. Selain itu Tiongkok meminta hak eksplorasi mineral terhadap pertambangan di Kongo sebagai timbal balik atas investasi yang diberikan sebesar 3 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan 3 miliar untuk investasi terhadap perusahaan patungan tersebut. Disisi lain, Kongo mendapatkan kepemilikan saham sebesar 32% yang dikelola oleh perusahaan BUMN yang bernama Gecamines. Dominasi ini semakin dipertegas melalui target ekstraksi mineral yang masif, mencakup 10,6 juta ton

tembaga dan 626,619 ton kobalt. Mekanisme ini merupakan instrumen Tiongkok dalam mengamankan pasokan komoditas mentah demi mendukung keberlangsungan industri dalam negeri Tiongkok, sekaligus awal dari ketergantungan Kongo sebagai eksportir mineral mentah bagi Tiongkok (Jansson 2011).

Sejak perjanjian tersebut hingga saat ini, ekonom Kongo secara konsisten bertumpu pada kegiatan ekspor komoditas mentah sebagai pilar utama pertumbuhan nasional. Ketergantungan tercermin melalui besarnya proporsi nilai ekspor terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Kongo. Berdasarkan data periode tahun 2020 hingga 2024, struktur ekonomi Kongo menunjukkan bahwa capaian PDB secara signifikan ditopang oleh performa sektor ekspor mineral mentah (GlobalEconomy 2024). Tingginya sektor ekspor komoditas primer ini menjadi komponen paling dominan dalam membentuk postur ekonomi makro Kongo yang didorong oleh tingginya permintaan kobalt.

Grafik 2. 3 Proporsi Ekspor terhadap PDB Kongo



Sumber: GlobalEconomy (2024)

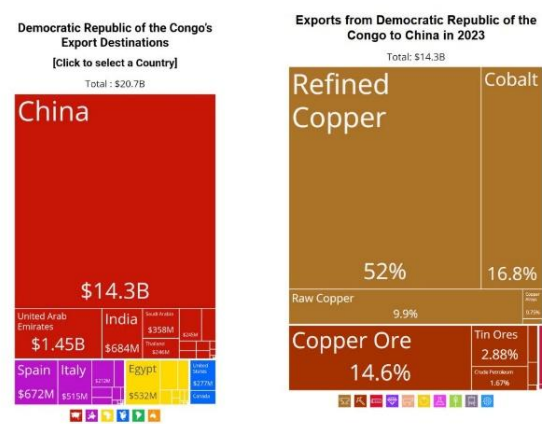
Dari data di atas menjelaskan terjadinya peningkatan signifikan proporsi ekspor terhadap PDB Kongo. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga ekspor hanya menyumbang sebesar

28,60% total PDB, tetapi sejak 2021 ekspor kembali menjadi utama penopang PDB hingga mencapai 46,62% pada tahun 2024. Pada tahun 2024 sektor ekspor menjadi penyumbang PDB tertinggi sejak tahun 2017, meskipun terjadi peningkatan pada sektor ekspor hal ini tidak membuat Kongo menjadi negara yang sejahtera. Kenyataannya pada tahun 2023 Kongo menjadi negara termiskin ke-6 dengan tingkat kemiskinan 62% di mana warga negara Kongo memiliki pendapatan kurang dari 2,15 Amerika dolar per hari (Kurniawan 2023). Hal ini diperburuk dengan meningkatnya jumlah tingkat kemiskinan yang terjadi di Kongo, di mana pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kongo ditaksir mencapai 73,5% yang menyebabkan penduduk Kongo berada pada garis kemiskinan ekstrem (Worldbank 2025).

Peningkatan jumlah ekspor Kongo tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok pada tahun 2013. Pada tersebut Presiden Xi Jinping berencana untuk menggabungkan jalur ekonomi yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa demi kepentingannya. Program yang dirancang tersebut bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan modal, memaksimalkan kapasitas konstruksi, memperluas perdagangan, dan mengkonsolidasikan hubungan ekonomi dan politik, dengan nama program *Belt and Road Initiative* (BRI) (Dollar 2019). Keterlibatan Tiongkok semakin menguat setelah Kongo resmi bergabung dengan kebijakan BRI dengan menandatangani kesepakatan MOU pada 6 Januari 2021. Sebagai langkah strategi Tiongkok untuk menarik perhatian Kongo dalam bergabung dengan program BRI, Tiongkok menghapus hutang Kongo sebesar 28 juta Amerika dolar yang telah jatuh tempo pada tahun 2020 (Nyabiage 2021).

Peningkatan signifikan dalam proporsi ekspor Republik Demokratik Kongo secara langsung didorong oleh lonjakan permintaan global terhadap mineral strategis, terutama kobalt dan tembaga sebagai bahan baku utama industri teknologi hijau. Tiongkok, sebagai pusat manufaktur elektronik dunia, menjadi destinasi utama yang menyerap komoditas mentah tersebut guna mendukung rantai pasok globalnya. Hal ini dibuktikan melalui data total ekspor Kongo ke Tiongkok pada tahun 2023 yang secara eksklusif didominasi oleh sektor pertambangan (OEC 2024). Dalam perspektif Dos Santos, fenomena ini menegaskan bahwa dinamika industrialisasi di negara pusat mendikte pola ekstraksi di negara periferi, sehingga memperdalam struktur ketergantungan ekonomi yang bersifat asimetris.

Gambar 2. 1 Negara Tujuan Ekspor Kongo dan Komoditas Ekspor Kongo ke Tiongkok



Sumber: OEC (2024)

Pola perdagangan tahun 2023 menggambarkan hubungan erat antara Kongo dan Tiongkok pada sektor ekonomi. Data ekspor Kongo tahun 2023 menunjukkan bahwa Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Kongo, dengan nilai

mencapai 14,3 miliar Amerika dolar atau sekitar 66,2% penerima hasil ekspor Kongo. Komoditas ekspor Kongo didominasi oleh sektor tambang, terutama olahan tembaga, kobalt, bijih tembaga, dan tembaga mentah yang menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Kongo bertumpu pada rantai pasok mineral strategis (OEC 2024). Akan tetapi, Kongo hanya sekedar mengekspor produk dalam bentuk mentah atau semi proses, yang menggambarkan industri dalam negeri Kongo belum dapat mengolah bahan komoditas mineral mentah menjadi barang siap pakai.

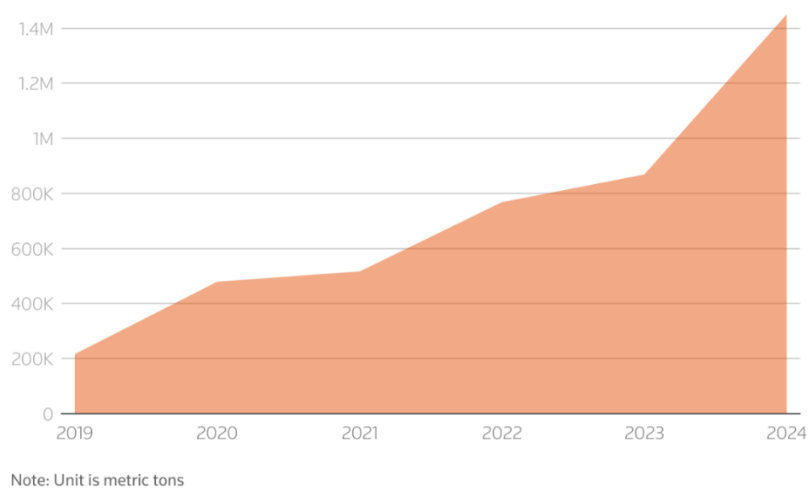
Tahun 2024 menjadi penguat dari dominasi Tiongkok terhadap ekspor komoditas ekspor mineral di Kongo. Hal ini dibuktikan pada tanggal 4 September tahun 2024, Presiden Kongo yaitu Felix Tshisekedi hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) FOCAC dengan Presiden Xin Jinping yang diselenggarakan di Beijing. Pertemuan tersebut membahas kerja sama dalam sektor industrialisasi, kemajuan pertanian, keamanan, dan kerja sama mengenai program BRI. Tiongkok berjanji akan mendorong Afrika menuju modernisasi dan membangun komunitas yang inklusif antara Tiongkok dan Afrika di masa depan. Selain itu, Kongo sendiri memiliki daya tarik yang lebih bagi Tiongkok, Kongo ditawarkan akan mendapatkan peningkatan investasi oleh Tiongkok pada sektor mineral penting seperti litium, tembaga, dan kobalt yang menjadi sektor utama hubungan ekonomi antara Kongo dan Tiongkok (Lawal 2024).

Presiden Xi Jinping sendiri mengatakan bahwa Tiongkok dan Kongo merupakan kawan satu perjalanan dalam proses menuju modernisasi masing-masing negara. Oleh karena itu, kedua belah pihak hendaknya menjadi teman tulus, sahabat yang saling menguntungkan, menang bersama, dan bersama mengusahakan

perdamaian (CRI 2024). Dengan demikian, Kongo memiliki posisi sebagai mitra strategis bagi Tiongkok, dengan upaya yang ditawarkan oleh Tiongkok kepada Kongo hubungan ini menjadi semakin menguat, sehingga menjadikan Kongo sebagai penerima manfaat yang memiliki nilai strategis tinggi dalam hubungan bilateral kedua negara.

Penguatan hubungan ini dibuktikan dengan proyek besar yaitu Kamoa-Kakula yang dilakukan oleh perusahaan Tiongkok Zijin Mining. Proyek ini ditujukan dalam kerja sama pengolahan tembaga bermutu tinggi terbesar di Afrika, di mana diperkirakan terdapat cadangan tembaga sebesar 43,69 juta ton yang terletak di sekitar provinsi Lualaba dan Haut-Katanga, tepatnya pada kota Kolwezi. Pada tahun 2024 kerja sama Kamoa-Kakula mengolah 437.000 ton tembaga, dengan hasil yang sangat besar ini Zijin Mining memproyeksikan akan meningkatkan produksi menjadi sebesar 520.000 hingga 580.000 ton tembaga pada tahun 2025 (Zhen 2025). Hal ini menjadikan proyek Kamoa-Kakula sebagai basis kerja sama mineral terpenting oleh pihak Tiongkok.

Grafik 2. 4 Impor Tembaga Tiongkok dari Kongo



Sumber: Reuters (2025b)

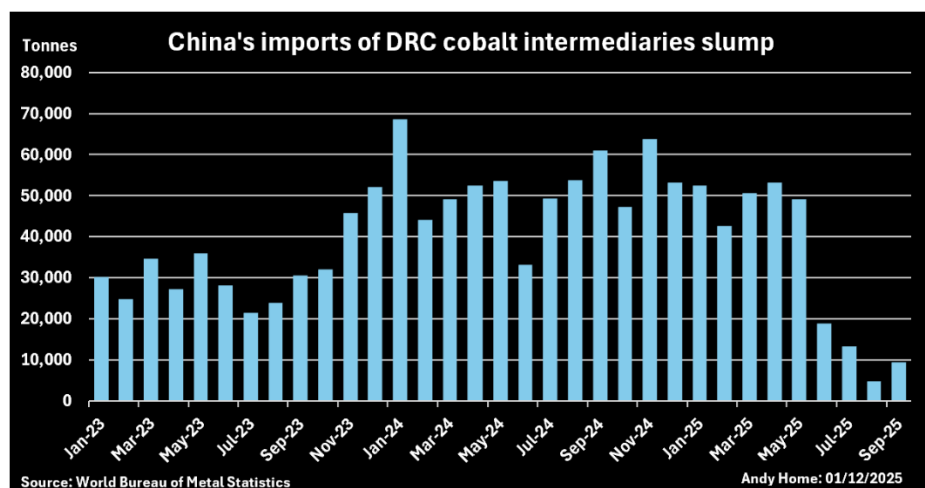
Sejak tahun 2019, arus impor tembaga dari Kongo ke Tiongkok mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan strategi diversifikasi pasar Tiongkok setelah diberlakukannya kenaikan pajak impor tembaga oleh Amerika Serikat. Tembaga Kongo menjadi alternatif yang menarik karena umumnya dikirim dalam bentuk *equivalent grade* (EQ), yaitu tembaga dengan kualitas setara namun belum terdaftar pada bursa Tiongkok yang menyebabkan harga tembaga Kongo relatif lebih murah, meskipun memenuhi spesifikasi kualitas Tiongkok (Reuters 2025b). Kondisi ini menjadikan tembaga Kongo sebagai alternatif terbaik bagi Tiongkok dan tercermin dari impor yang terus meningkat hingga mencapai sekitar 1,4 juta ton pada tahun 2024.

Meskipun Kongo dan Tiongkok memiliki hubungan yang harmonis, tetapi pada tahun 2025 pemerintah Kongo mengeluarkan kebijakan moratorium ekspor kobalt sebagai upaya untuk mengendalikan ekspor kobalt negaranya. Komite Pengelolaan dan Pengendalian pasar Mineral Strategis Kongo (ARECOMS) memberlakukan kebijakan baru berupa penghentian sementara ekspor kobalt yang berlaku pada 22 Februari 2025. Langkah tersebut diterapkan sebagai respons terhadap kondisi pertambangan dalam negeri yang dianggap tidak stabil sehingga merugikan pihak Kongo yang disebabkan oleh Tiongkok (SMM 2025a). Pihak Kongo memiliki visi baru dengan menggunakan kendalinya atas produksi kobalt global untuk mengelola pasar dengan cara yang menguntungkan baik untuk warga maupun ekonomi negaranya.

Selain itu kebijakan ini digunakan sebagai langkah dalam memperbaiki tata Kelola produksi dan distribusi mineral, regulasi ini menetapkan bahwa seluruh

ekspor kobalt yang berasal dari aktivitas penambangan di Kongo akan dihentikan untuk jangka waktu empat bulan. Kebijakan tersebut akan dievaluasi secara bertahap setelah tiga bulan pertama untuk menentukan kebijakan tersebut perlu diperpanjang, disesuaikan, atau dihentikan. Pemerintah Kongo menilai pembatasan ini diperlukan untuk menertibkan alur produksi, mencegah kelebihan pasokan ke pasar global, menjamin kepatuhan kontraktual dengan perusahaan asing, serta memberikan waktu bagi negara untuk meninjau ulang mekanisme penjualan, harga (SMM 2025a). Kebijakan tersebut kembali diperpanjang selama tiga bulan, pada 21 Juni 2025 pemberhentian sementara ekspor kobalt Kembali dilakukan, keputusan tersebut dimaksudkan untuk menjaga distribusi kobalt yang berlebihan pada pasar global (Reuters 2025a).

Grafik 2. 5 Ekspor Kobalt Kongo Terhadap Tiongkok



Sumber: Home (2025)

Selama ini Kongo dikenal sebagai eksportir utama kobalt dunia, namun pada tahun 2025 setelah Kongo mengeluarkan kebijakan moratorium ekspor kobalt menandai perubahan signifikan dalam ekspor kobalt global terutama kepada

Tiongkok. Grafik di atas menunjukkan bahwa kebijakan penghentian sementara ekspor kobalt menyebabkan penurunan tajam volume ekspor sejak Mei 2025. Pada periode Juni hingga September, volume ekspor tercatat hanya sekitar 50.000 metrik ton, di mana jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan volume ekspor Kongo pada periode-periode sebelumnya. Untuk tetap memenuhi kebutuhan industri baterai kendaraan listrik, Tiongkok mengambil langkah alternatif dengan beralih ke baterai litium besi fosfat (LFP) yang tidak membutuhkan kobalt maupun nikel (Home 2025). Kondisi ini tentu akan menandakan arah baru dan stabilitas hubungan antara Tiongkok dan Kongo yang telah terjalin erat sejak lama.

Struktur ekonomi Kongo dalam relasinya dengan Tiongkok mencerminkan tesis Santos mengenai ketergantungan yang disebabkan oleh sektor ekspor komoditas tradisional. Sebagai negara tertinggal, Kongo terjebak sebagai aktor penyedia kebutuhan mineral terutama kobalt dan tembaga bagi industri Tiongkok. Selain itu, sektor ekspor menjadi sumber utama perolehan devisa negara, berdasarkan data proporsi ekspor terhadap PDB Kongo, terlihat bahwa perolehan devisa yang terus meningkat tidak dialokasikan untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Melainkan terkuras kembali ke negara pusat untuk membiayai impor barang modal, mesin, dan teknologi yang berasal dari Tiongkok (Santos 1970).

Hal ini dilihat dari tingkat kemiskinan yang meningkat, sehingga menegaskan bahwa kemajuan sektor pertambangan Kongo pada dasarnya hanya berfungsi sebagai penyokong industri Tiongkok. Ketergantungan struktural ini pada akhirnya menghambat terjadinya transformasi industri dan pengembangan pasar domestik di Kongo. Dampak dari ketergantungan ini mengunci negara Kongo dalam mempertahankan industri yang bersifat ekstraktif, kehadiran Tiongkok

melalui perjanjian Sicomines tidak menciptakan penguatan pada industri manufaktur Kongo. Hal ini disebabkan, seluruh aktivitas ekonomi diarahkan untuk memenuhi permintaan mineral strategis bagi industri elektronik Tiongkok terutama industri EV. Akibatnya, Kongo tidak mampu mengembangkan diversifikasi ekonomi internal dan tetap berada dalam posisi subordinat, di mana kedaulatan ekonominya sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan negara Tiongkok, sementara industri domestiknya tetap bertumpu pada industri tradisional (Santos 1970).

2.2 Peran Pemerintahan Kongo dalam Mempertahankan Ketergantungan Ekspor Tradisional

Ketergantungan Kongo terhadap ekspor komoditas mentah tidak dapat dilepaskan oleh peran oligarki yang secara sistematis telah memaksa Kongo tetap terbelenggu sebagai negara pemasok mineral mentah demi kepentingan elit. Di mana pada akhir tahun 2021, terungkap bahwa terdapat tindak pidana korupsi yang sangat masif oleh Presiden Joseph Kabila selama masa jabatannya. Terungkapnya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Joseph Kabila melalui investigasi terhadap BGFI bank, sebuah lembaga keuangan swasta di Kongo. Investigasi tersebut menemukan bahwa BGFI bank telah menggelapkan keuangan sekitar lebih dari 125 juta Amerika dolar yang kemudian diberikan kepada keluarga Kabila. BGFI bank menjadi perantara dari kejahatan korupsi bagi kelompok elit dalam menyembunyikan hasil korupsi dari kekayaan alam (Clowes and Kavanagh 2021).

Eksplotasi oligarki dalam melakukan tindak korupsi hadir melalui perjanjian-perjanjian strategis antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan

pemerintahan Kabila. Selain melalui BGFI bank, terdapat beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa pada sejak Juni hingga September tahun 2016, Sicominex telah memberikan pendanaan sebesar 25 juta Amerika dolar kepada perusahaan yang bernama Congo Construction Company (CCC), di mana perusahaan tersebut memiliki hubungan erat dengan Kabila. Perusahaan ini berfungsi sebagai perantara elit untuk mendistribusikan dana tersebut kepada Kabila, sekutunya, dan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Kongo (Cavanagh *and* Clowes 2021). Praktik ini mengonfirmasi tesis Santos bahwa oligarki domestik sering kali bekerja sama dengan modal asing untuk mengamankan rantai ekonomi pribadi, yang pada gilirannya memperkuat ketergantungan negara pada ekspor komoditas mentah.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kabila juga menghambat terjadinya peningkatan ekonomi, di mana pemerintahan Kabila dinilai telah melakukan manipulasi terhadap pembangunan infrastruktur energi yang ditujukan untuk pembangunan nasional. Kerja sama antara perusahaan Tiongkok dan perusahaan BUMN Gecamines dalam membangun pembangkit listrik tenaga air, digunakan sebagai cara untuk memperkaya diri. Korupsi ini dilakukan dengan pengalihan saham negara sekitar 15% kepada Coman, sebuah bisnis yang memiliki hubungan dengan rezim Kabila. Selain tindakan korupsi, oligarki ini telah memalsukan amandemen rahasia terhadap perjanjian Sicominex pada tahun 2017. Perjanjian awal yang disepakati tahun 2009 mengharuskan 100% pendapatan Sicominex dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur RDK hingga pinjaman tersebut lunas. Namun, pemerintahan Kabila dan konsorsium Tiongkok secara diam-diam mengubah klausul tersebut sehingga 35% dari pendapatan justru ditransfer ke

pemegang saham Tiongkok sebagai dividen, bukan untuk pembangunan (Ross *and* Reid 2021).

Sejak terpilihnya Felix Tshisekedi sebagai presiden Kongo pada Januari 2019, Tshisekedi berjanji akan meninjau kembali perjanjian-perjanjian pertambangan dengan Tiongkok demi mencari keadilan ekonomi yang lebih baik bagi rakyat Kongo. Rezim Tshisekedi pada tahun 2024 berhasil melakukan negosiasi ulang terhadap kesepakatan Sicominex dengan menghasilkan komitmen Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur sebesar 5,5 miliar Amerika dolar hingga tahun 2024 (Mukoko 2024). Namun, model ini tetap mengandalkan pendapatan dari tembaga dan kobalt untuk membiayai pembangunan, yang berarti setiap penurunan harga mineral di pasar global akan langsung menghambat proyek infrastruktur nasional.

Ketergantungan Kongo terhadap sektor ekspor kepada Tiongkok bukan hanya mekanisme hubungan bilateral saja, melainkan terdapat campur tangan rezim yang secara sadar memelihara struktur ekonomi yang ekstraktif. Rezim Kabila berperan penting dalam melanggengkan industri ekstraktif demi akumulasi kekayaan pribadi melalui praktik korupsi. Bukti tersebut telah terjadi terhadap beberapa manipulasi perjanjian dan sistem perbankan untuk memfasilitasi penggelapan keuangan negara dan menerima pembayaran ilegal dari perusahaan Tiongkok. Dengan tindakan tersebut, rezim Kabila secara efektif menghambat transformasi pasar dan pengembangan industri dalam negeri (Santos 1970).

BAB III

ANALISIS KETERGANTUNGAN KONGO TERHADAP INVESTASI TIONGKOK

Ketergantungan terjadi ketika negara-negara berkembang terikat secara struktural dalam sistem ekonomi global yang didominasi oleh negara inti. Bentuk ketergantungan baru tidak lagi bertumpu pada kontrol sistem penjajahan, melainkan pada dominasi teknologi, modal, dan investasi yang dikuasai oleh perusahaan multinasional. Dampaknya pembangunan industri domestik negara berkembang bertumpu pada aktor eksternal, sehingga perkembangan negara berkembang bergantung pada ekspansi yang dilakukan oleh negara inti atau maju (Santos 1970).

Dalam konteks hubungan antara Kongo dan Tiongkok mencerminkan pola ketergantungan baru yang telah dijelaskan oleh Santos. Kongo, sebagai negara kaya sumber daya mineral strategis, bergantung pada ekspor komoditas mentah yang kemudian menciptakan defisit sehingga membutuhkan pendanaan dari aktor eksternal atau investasi asing. Selain itu, pengembangan industri Kongo terhambat karena negara tertinggal tidak memiliki teknologi untuk mengembangkan industri dalam negerinya. Kondisi ini membutuhkan aktor eksternal seperti Tiongkok untuk mengelola industri pertambangannya. Disisi lain, Tiongkok memanfaatkan hubungan tersebut untuk mengamankan pasokan kobalt dan tembaga guna menopang industrinya. Ketergantungan Kongo dengan Tiongkok terjadi secara struktural, dimana harga komoditas yang rendah, pembagian keuntungan, pendanaan, dan teknologi berada di tangan perusahaan Tiongkok (Santos 1970).

3.1 Ketergantungan Terhadap Investasi Asing yang Diakibatkan oleh Defisit Neraca Perdagangan

Dalam kerangka ketergantungan baru yang dikemukakan oleh Theotonio Dos Santo, hubungan perdagangan internasional beroperasi dalam pasar yang sangat monopolistik, dimana negara periferi terjebak dalam mekanisme pertukaran yang tidak setara. Hal ini diakibatkan oleh harga komoditas primer yang diekspor oleh negara tertinggal cenderung mengalami penurunan harga di pasar global, sementara harga produk industri yang harus diimpor terus meningkat. Sehingga secara struktural neraca perdagangan negara dependen menjadi tidak menguntungkan. Dampaknya, negara tertinggal mengalami defisit dan terjebak dalam kerentanan ekonomi yang dalam (Santos 1970).

Selain ketimpangan perdagangan, defisit juga terjadi akibat dominasi modal asing pada sektor-sektor ekspor unggulan. Perusahaan multinasional atau konsorsium asing, secara konsisten memulangkan volume keuntungan yang lebih besar ke negara asal dibandingkan dengan negara tertinggal, yang mengakibatkan investasi tersebut menjadi merugikan bagi negara tertinggal. Tidak hanya melalui pembagian keuntungan, defisit juga diperdalam melalui layanan tertentu yang dikendalikan oleh aktor eksternal, mulai dari biaya angkutan barang, pembayaran royalti, maupun bantuan teknis. Akibatnya akumulasi beban tersebut menjadikan negara tertinggal mengalami defisit yang mendalam pada neraca pembayaran yang membatasi kapasitas negara untuk mengimpor kebutuhan industri dalam negeri (Santos 1970).

Kondisi ini menyebabkan negara tertinggal membutuhkan pendanaan asing sebagai solusi yang tampak esensial namun bersifat menjebak. Pendanaan asing

tersebut akan digunakan untuk menutupi defisit neraca pembayaran yang terus memburuk dan untuk mendanai pembangunan untuk menciptakan investasi lainnya demi meningkatkan ekonomi negara tertinggal. Akan tetapi, Santos menyatakan bahwa modal asing dan bantuan luar negeri hanya digunakan untuk menambal lubang defisit yang telah diciptakan oleh kehadiran modal asing itu sendiri dalam struktur ekonomi negara tertinggal (Santos 1970).

Siklus ini menunjukkan bahwa ketergantungan bukan sekedar hambatan eksternal, melainkan mekanisme yang terinternalisasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Dengan terus mengandalkan pinjaman luar negeri untuk membiayai industrialisasi yang bergantung pada teknologi negara inti, negara-negara seperti Kongo kehilangan otonomi atas keuntungan ekonominya sendiri. Ketergantungan terhadap investasi ini menjadi bukti bagaimana negara tertinggal terus berupaya mengejar pertumbuhan melalui pendanaan asing, padahal di saat yang bersamaan, kapasitas kemandirian ekonomi domestik terus tergerus (Santos 1970).

3.1.1 Ketergantungan Kongo yang Disebabkan oleh Pasar Internasional yang Monopolistik Sehingga terjadi Defisit

Menurut pemikiran Theotonio Dos Santos dalam teori ketergantungan, hubungan perdagangan internasional sering kali berlangsung dalam struktur pasar yang bersifat monopolistik dan tidak seimbang. Dalam struktur tersebut, negara-negara tertinggal umumnya berperan sebagai pemasok utama bahan baku, sementara negara yang memiliki kapasitas industri dan teknologi lebih maju menguasai proses produksi serta distribusi barang bernilai tambah tinggi. Kondisi ini menyebabkan harga komoditas primer yang diekspor oleh negara berkembang

cenderung ditekan pada tingkat yang rendah, sedangkan harga produk industri yang diimpor justru relatif lebih tinggi yang menyebabkan defisit bagi negara tertinggal. Pola perdagangan semacam ini menciptakan hubungan ekonomi yang tidak setara, di mana negara berkembang semakin bergantung pada negara industri, sehingga memperkuat terbentuknya bentuk ketergantungan baru dalam sistem ekonomi global (Santos 1970).

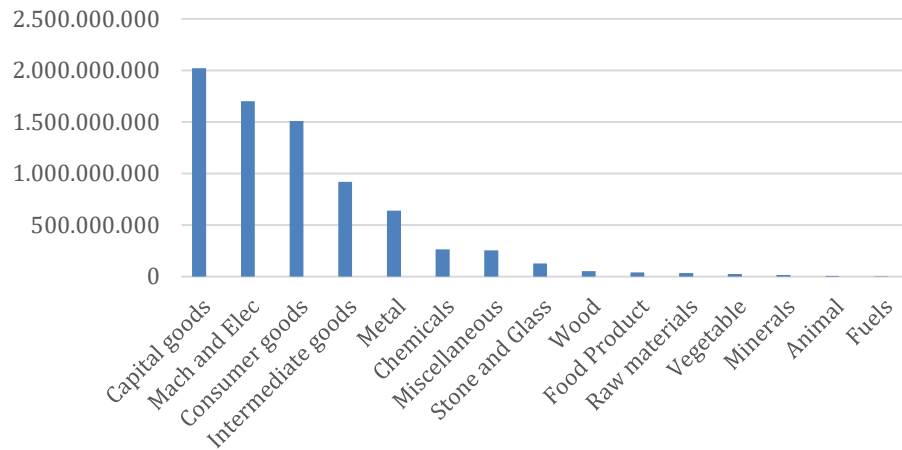
Sebagai pemasok mineral strategis pada pasar global, ketergantungan Kongo terhadap ekspor komoditas mentah menunjukkan kelemahan ekonomi negaranya. Meskipun Kongo memegang kendali atas 72,1% pasokan kobalt global dan memiliki cadangan tembaga yang sangat besar, rendahnya daya tawar Kongo pada pasar global tidak memberikan keuntungan bagi kedaulatan ekonomi Kongo. Sebaliknya, kontrol atas rantai pasokan dari industri hingga pemurnian didominasi oleh aktor-aktor eksternal, terutama perusahaan-perusahaan yang berasal dari Tiongkok. Dominasi ini menciptakan kendali atas produksi mineral di Kongo berada pada aktor eksternal yang menyebabkan penurunan harga akibat kelebihan pasokan mineral yang berasal dari Kongo (Mondal 2024).

Melalui strategi investasi yang agresif, Tiongkok berhasil memperkuat posisinya dalam sektor pertambangan di Kongo dengan menguasai sebagian besar operasi produksi mineral strategis milik Kongo. Kondisi ini membuat perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat mengendalikan lebih dari 60% produksi kobalt di Kongo serta sekitar 80% kapasitas pemurnian kobalt global. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan produksi kobalt yang didorong oleh meningkatnya permintaan industri global terhadap kobalt, terutama dari industri kendaraan listrik yang menyumbang sekitar 45% dari total permintaan. Selain itu, sekitar 26% permintaan berasal dari

industri perangkat portabel seperti panel surya dan baterai, 9% dari industri *super alloy*, dan 20% dari sektor industri lainnya (Insight Forward 2025). Akan tetapi, peningkatan produksi kobalt di Kongo menimbulkan tantangan baru, karena pada tahun 2023 harga kobalt global mengalami penurunan hingga sekitar 60%. Menurut Internasional Energy Agency (IEA), tren penurunan harga tersebut diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan (Mondal 2024). Titik terendah harga kobalt Kongo terjadi pada bulan Februari 2025 dengan nilai 10 Amerika dolar per pon (Reuters 2025a).

Penurunan harga kobalt di pasar global memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Kongo. di mana pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kongo mengalami penurunan menjadi sekitar 6,5% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 8,6%. Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya industri pada sektor mineral mentah yang sebelumnya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketergantungan yang ekspor mineral mentah yang telah dikendalikan oleh pasar global, menyebabkan perekonomian Kongo sangat rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Selain itu, kondisi tersebut juga berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan inflasi, tercatat mencapai 19,9% pada tahun 2023 dan mencapai 17,7% pada tahun 2024 (International Trade Administration 2026).

Grafik 3. 1 Impor Kongo terhadap Tiongkok Pada Tahun 2023



Sumber: WITS (2023)

Grafik di atas menunjukkan, komoditas utama impor Kongo yang berasal dari Tiongkok didominasi oleh barang kebutuhan modal dan manufaktur Kongo, sehingga mencerminkan peran Tiongkok sebagai pemasok kebutuhan industri dalam negeri Kongo. Nilai ekspor utama sebesar 2,02 miliar Amerika dolar (45,05%) berasal dari *capital goods*, di mana komoditas ini merupakan barang-barang penunjang industri dalam negeri seperti mesin, peralatan industri, maupun kebutuhan bangunan. Komoditas terbesar selanjutnya ditopang oleh mesin dan peralatan listrik dengan nilai sebesar 1,70 miliar (37,94%) Amerika dolar, produk-produk tersebut digunakan untuk sektor pertambangan, konstruksi, energi, dan infrastruktur. Selain itu, Kongo juga menerima ekspor consumer goods senilai 1,51 miliar Amerika dolar (33,68%), di mana produk seperti elektronik, tekstil, dan barang konsumsi lainnya untuk keperluan pribadi atau rumah tangga (WITS 2023). Pola ini menunjukkan bahwa impor Tiongkok ke Kongo berfokus pada produk bernilai tambah tinggi dan kebutuhan industri, sehingga menggambarkan bahwa

Kongo berperan sebagai pemasok bahan mineral mentah dalam hubungan perdagangan bilateral tersebut.

Pada tahun 2022 hingga 2023, kondisi ekonomi Kongo mengalami tekanan yang tercermin dari peningkatan defisit neraca transaksi. Defisit tersebut mengalami peningkatan dari 4,9% menjadi 6,3% terhadap PDB Kongo. Peningkatan defisit ini dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan impor serta memburuknya kinerja neraca perdagangan yang tercatat sebesar -8,1%. Kondisi ini memberikan tekanan terhadap stabilitas fiskal negara, sehingga beban hutang luar negeri Kongo mengalami peningkatan dari 14,8% menjadi 17,8% terhadap PDB. Data ini menunjukkan bahwa komoditas ekspor tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskal negara akibat dari penurunan harga kobalt sehingga menciptakan defisit bagi Kongo (African Development Bank 2024).

Hubungan ekonomi antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok dapat dipahami melalui konsep ketergantungan baru yang dikemukakan oleh Theotonio Dos Santos. Konsep ini menjelaskan bagaimana negara berkembang sering terperangkap dalam struktur ekonomi global yang cenderung menguntungkan aktor dominan. Meskipun Kongo menguasai lebih dari 72% cadangan kobalt dunia dan 43,69 juta ton tembaga, keunggulan sumber daya tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi posisi tawar yang kuat di pasar internasional. Sebaliknya, dominasi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang mengendalikan lebih dari 60% produksi kobalt di Kongo serta sekitar 80% kapasitas pemurnian kobalt global menempatkan Tiongkok sebagai aktor yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan harga. Dalam situasi ini, Kongo cenderung berperan sebagai penerima harga di pasar global. Hal tersebut tercermin

dari penurunan harga kobalt dunia hingga sekitar 60% pada tahun 2023, yang kemudian mencapai titik terendah pada Februari 2025 dengan kisaran harga sekitar 10 dolar AS per pon. Penurunan harga ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika pasar, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan pasokan yang sebagian besar berada di bawah kendali perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berupaya menjaga stabilitas rantai pasok bagi industri kendaraan listrik dan teknologi energi bersih (Santos 1970).

Ketimpangan dalam hubungan ekonomi tersebut semakin terlihat melalui struktur perdagangan bilateral yang menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi Kongo terhadap Tiongkok. Dalam praktiknya, Kongo mengeksport mineral mentah dengan nilai tambah yang relatif rendah, sementara pada saat yang sama negara tersebut harus mengimpor berbagai barang modal, mesin industri, serta produk manufaktur dari Tiongkok dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Data perdagangan menunjukkan bahwa impor barang modal mencapai sekitar 2,02 miliar dolar AS, sementara impor mesin listrik tercatat sekitar 1,70 miliar dolar AS. Pola pertukaran yang tidak seimbang ini secara tidak langsung memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi domestik Kongo. Dampaknya dapat dilihat dari meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan yang naik dari 4,9% menjadi 6,3% terhadap PDB, serta bertambahnya beban utang luar negeri dari 14,8% menjadi 17,8% terhadap PDB. Selain itu, tekanan inflasi juga meningkat hingga mencapai 19,9% pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antara Kongo dan Tiongkok tidak sepenuhnya mencerminkan kemitraan yang setara, melainkan memperlihatkan pola ketergantungan struktural yang membuat Kongo tetap berada pada posisi periferi dalam sistem ekonomi global (Santos 1970).

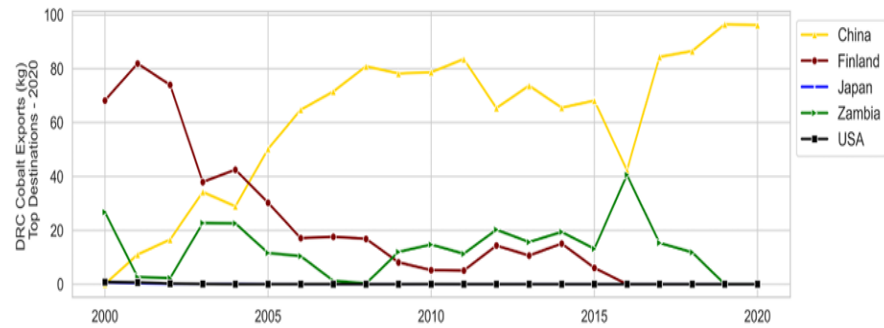
3.1.2 Dominasi Investasi Asing Tiongkok Dalam Industri Pertambangan Kongo

Menurut analisis Theotonio Dos Santos, ketergantungan ekonomi negara berkembang seringkali diperkuat melalui dominasi modal asing pada sektor-sektor paling produktif dalam perekonomian domestik. Investasi asing langsung yang masuk umumnya berfokus pada sektor unggulan yang memiliki potensi keuntungan tinggi, seperti industri ekstraktif atau komoditas strategis. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh negara penerima investasi, melainkan dipulangkan kembali ke negara asal investor dalam bentuk repatriasi keuntungan. Kondisi ini menyebabkan aliran modal keluar yang lebih besar dibandingkan modal yang masuk, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam neraca modal. Akibatnya, negara berkembang justru mengalami defisit struktural yang memperlihatkan bagaimana dominasi investor asing memperkuat ketergantungan ekonomi terhadap negara pemodal (Santos 1970).

Investasi Tiongkok pada sektor pertambangan di Kongo mulai berkembang pesat sejak disepakatinya perjanjian Sicominex. Melalui penanaman modal yang signifikan pada sektor pertambangan, Tiongkok kemudian menjadi mitra ekonomi utama bagi Kongo. Hubungan ini tidak terlepas dari pendekatan yang ditawarkan Tiongkok, seperti pemberian pinjaman dengan bunga relatif rendah serta prinsip kerja sama yang tidak mencampuri urusan politik domestik. Sehingga investasi yang dilakukan Tiongkok tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kerja sama ekonomi, tetapi juga menjadi strategi Tiongkok untuk mengamankan pasokan mineral strategis, khususnya kobalt dan tembaga. Dominasi ini tercermin dari

kepemilikan saham Tiongkok pada 15 dari 19 perusahaan pertambangan di Kongo pada tahun 2020 (Bociaga 2022).

Grafik 3. 2 Negara penerima Ekspor Kobalt Kongo



Sumber: (Altiparmak *et al.* 2025)

Tabel 3 1 Jumlah Investasi Asing Langsung di Kongo

Outward FDI stock of origin countries in DRC.							
Year	China	Germany	Japan	South Korea	United Kingdom	United States	Netherlands
2000				\$0.1		\$102.0	
2001				\$0.6		\$96.0	
2002				\$2.5		\$70.0	
2003	\$0.2			\$2.6		\$55.0	\$45.5
2004	\$15.7			\$2.7		\$65.0	\$69.5
2005	\$25.1			\$2.7		\$51.0	\$67.2
2006	\$37.6			\$5.8		\$21.0	\$0.0
2007	\$104.4			\$8.4		\$0.0	\$0.0
2008	\$134.1	\$(40.4)		\$8.1		\$0.0	\$448.1
2009	\$397.4	\$0.0		\$8.6	\$0.0	\$0.0	\$511.4
2010	\$630.9	\$0.0		\$9.2	\$0.0	\$0.0	\$455.6
2011	\$709.3	\$0.0	\$0.0	\$9.5	\$0.0	\$0.0	\$565.4
2012	\$970.5	\$22.4	\$0.0	\$5.2	\$0.0	\$0.0	\$2397.4
2013	\$1091.8	\$34.5	\$0.0	\$(28.5)	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2014	\$2168.7	\$60.7	\$0.0	\$(9.8)	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2015	\$3239.4	\$0.0	\$0.0	\$(15.1)	\$4.4	\$0.0	\$180.7
2016	\$3515.0	\$51.7	\$0.0	\$(17.3)	\$3.7	\$75.0	\$(287.8)
2017	\$3894.1	\$0.0	\$0.0	\$4.6	\$4.1	\$76.0	\$(397.0)
2018	\$4444.5	\$0.0	\$0.0	\$4.1	\$5.1	\$80.0	\$(290.8)
2019	\$5596.6	\$0.0	\$0.0	\$9.6	\$3.9	\$86.0	\$138.2
2020	\$3688.1	\$0.0	\$0.0	\$9.7	\$2.7	\$25.0	\$2795.3

Sumber: (Altiparmak *et al.* 2025)

Meningkatnya jumlah ekspor kobalt Kongo terhadap Tiongkok dapat dilihat dari data ekspor kobalt dan investasi asing langsung yang dilakukan oleh Tiongkok di Kongo. Data di atas memperlihatkan pola peningkatan investasi Tiongkok berbanding lurus dengan meningkatnya ekspor Kongo pada Tiongkok. Pada awal tahun 2000-an, ekspor kobalt Kongo relatif terdiversifikasi, dengan Finlandia,

Zambia, dan Tiongkok sebagai tujuan utama (Altiparmak *et al.* 2025). Akan tetapi setelah perjanjian investasi yang dilakukan oleh Tiongkok dan Kongo menunjukkan perubahan drastis dalam tujuan ekspor kobalt Kongo. Pada tahun 2020, hampir seluruh kobalt mentah Kongo diekspor ke Tiongkok, dominasi ini terjadi karena dampak investasi jangka panjang Tiongkok yang menjadikan FDI sebagai alat peningkatan ekonomi. Dengan menanamkan modal dalam jumlah besar pada sektor tambang, infrastruktur pendukung, dan fasilitas pengolahan awal, Tiongkok berhasil memposisikan diri sebagai pihak yang bukan hanya membeli kobalt, tetapi juga mengontrol akses terhadap produksi kobalt itu sendiri.

Meskipun investasi yang dilakukan oleh Tiongkok dinilai memberikan manfaat ekonomi serta membantu dalam menjaga stabilitas fiskal Kongo, sejumlah temuan audit pada tahun 2018 menunjukkan adanya kurangnya transparansi pada implementasinya. Pemerintah Kongo mencatat bahwa masyarakat lokal mengalami kerugian sekitar 198 juta Amerika dolar akibat berbagai pelanggaran seperti pembayaran yang tidak penuh, pelaporan yang tidak sesuai, serta tidak dibayarkannya kontribusi wajib bagi masyarakat sebesar 0,3%. Laporan audit tersebut menyoroti beberapa perusahaan pertambangan besar yang terlibat, seperti Kamoa Copper, Kamoto Copper Company, Sicomin, dan Tenke Fungurume Mining, perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar perusahaan terlibat berasal dari Tiongkok. Dalam menjaga kedaulatannya, *Court of Accounts of the Democratic Republic of the Congo* menyarankan pemerintah untuk menanggukkan perusahaan yang tidak patuh melalui proses hukum (Houenou 2025).

Akan tetapi, investasi yang hadir di Kongo menimbulkan sejumlah permasalahan serius. Sebagai cara pemerintah Kongo dalam meningkatkan

investasi di negaranya dengan penerapan klausul pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sektor strategis, khususnya pertambangan. Tetapi dalam implementasinya justru memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan-perusahaan asing dan mengurangi potensi penerimaan negara. Akibatnya, pemerintah Kongo diperkirakan mengalami kerugian yang mencapai miliaran Amerika dolar karena hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi domestik (Gregory and Milas 2024).

Selain kehilangan potensi dari penerimaan pajak, tekanan ekonomi diperparah dengan meningkatnya utang luar negeri yang mayoritas dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2023, total utang luar negeri Kongo tercatat sekitar 11,7 miliar Amerika dolar, hutang ini meningkat sekitar 13,92% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,71 miliar Amerika dolar (Macrotrends 2025). Sebagian dari utang tersebut berasal dari pinjaman Tiongkok dengan hutang mencapai sekitar 3,2 miliar Amerika dolar akibat kerja sama pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur (S&P Global 2025).

Ketergantungan Kongo terhadap modal asing, terutama dengan Tiongkok yang telah menguasai 15 dari 19 perusahaan pertambangan di Kongo, menciptakan struktur yang secara sistematis mengeluarkan keuntungan dari negara tertinggal ke negara inti. Pembagian keuntungan yang tidak transparan serta pemberlakuan kebijakan pembebasan pajak bagi perusahaan asing bukan sekedar kebijakan fiskal, melainkan menjelaskan mekanisme hubungan asimetris yang menguras potensi pendapatan negara demi akumulasi modal global. Akibatnya, meskipun ekspor mineral terus mengalami peningkatan, Kongo tetap mengalami defisit struktural

karena sebagian besar nilai tambah dari komoditas primer tersebut direpatriasi oleh investor asing, sementara pemerintah kehilangan kendali atas sumber daya produktifnya sendiri (Santos 1970).

Pembagian keuntungan ini menyebabkan defisit yang membelenggu bagi Kongo, sehingga untuk menutup defisit anggaran tersebut Kongo membutuhkan investasi asing lainnya. Hal ini menyebabkan permasalahan baru, hutang luar negeri Kongo terus mengalami peningkatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan menutupi defisit yang terjadi. Kenaikan hutang luar negeri hingga mencapai 11,7 miliar Amerika dolar sebagian besar dialokasikan untuk proyek infrastruktur melalui skema Resource for Infrastructure (RFI). Hal ini membuktikan posisi Kongo sebagai negara periferi yang bergantung pada modal asing yang sering kali hanya berfungsi sebagai arus dalam ekspor mineral ke negara pusat, bukan untuk pengembangan industri nasional. Hal ini menciptakan siklus kerentanan permanen, dimana Kongo terpaksa mengambil pinjaman baru untuk menutupi defisit neraca pembayaran dan pembagian keuntungan yang pada akhirnya semakin mengunci kedaulatan ekonomi negara di bawah tuntutan modal asing (Santos 1970).

3.1.3 Investasi Asing sebagai Instrumen Penutup Defisit dan Pembangunan Infrastruktur Kongo

Pembagian keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh aktor eksternal menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan yang kemudian memunculkan persoalan baru dalam struktur perekonomian negara berkembang. Defisit yang dihasilkan dari dominasi modal asing pada akhirnya mendorong negara penerima investasi untuk kembali mencari sumber pembiayaan eksternal guna menutup

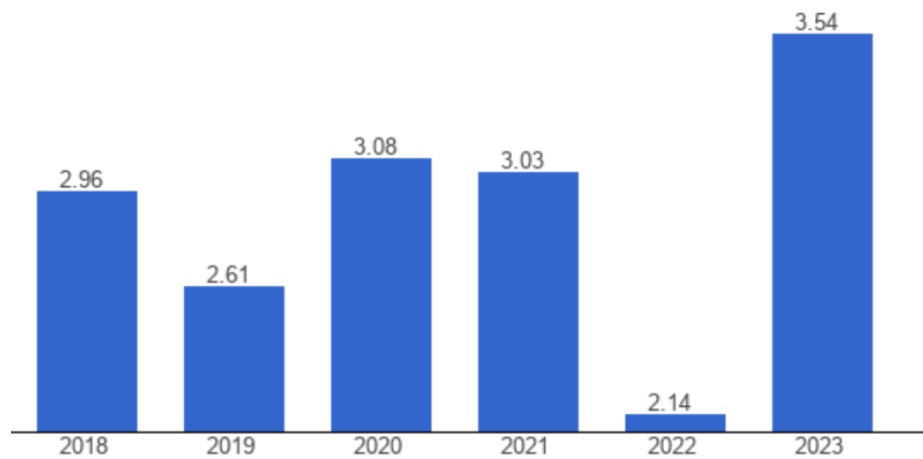
kekurangan tersebut. Dalam situasi ini, investasi asing baru maupun pinjaman luar negeri menjadi instrumen yang dianggap perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membiayai pembangunan. Namun, ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal tersebut justru memperkuat siklus ketergantungan, karena modal asing dan bantuan internasional pada dasarnya digunakan untuk menutup defisit yang sebagian besar dihasilkan oleh mekanisme pengaliran keuntungan ke luar negeri dan pembangunan. Dengan demikian, sistem ini menciptakan lingkaran ketergantungan yang terus berulang dalam perekonomian negara berkembang (Santos 1970).

Kondisi defisit ekonomi di Republik Demokratik Kongo menunjukkan peningkatan tekanan fiskal dan eksternal dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, rasio utang publik tercatat sekitar 22% terhadap PDB dengan utang luar negeri sebesar 14,8% dari PDB, sementara defisit neraca transaksi berjalan berada pada kisaran 4,9% dari PDB. Memasuki tahun 2023, tekanan ekonomi semakin terlihat ketika defisit neraca transaksi berjalan meningkat menjadi 6,3% dari PDB, yang terutama dipicu oleh memburuknya neraca perdagangan hingga mencapai 8,1% serta tingginya kebutuhan impor. Pada periode yang sama, defisit anggaran pemerintah juga meningkat dari 0,5% menjadi 1,7% dari PDB akibat lonjakan pengeluaran luar biasa, khususnya untuk sektor keamanan dan penyelenggaraan pemilihan umum. Meskipun pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan sebesar 5,4% atau setara dengan 13,6% dari PDB, tekanan fiskal tetap terjadi. Selain itu, utang luar negeri juga meningkat menjadi 17,8% dari PDB, meskipun rasio utang publik secara keseluruhan sedikit menurun menjadi 21,5% pada tahun 2023 (African Development Bank 2025).

Untuk menutupi defisit yang terjadi Kongo memerlukan investasi atau modal dari aktor eksternal seperti Tiongkok. Pada tahun 2021 Tiongkok menghapus hutang Kongo sebesar 28 juta Amerika dolar yang telah jatuh tempo pada tahun 2020 sebagai imbalan Kongo dalam yang bergabung dengan kebijakan BRI Tiongkok. Selain dengan penghapusan hutang, Tiongkok memberikan pinjaman modal sebesar 17 juta Amerika dolar sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan infrastruktur Kongo sebesar 15 juta Amerika dolar dan 2 juta Amerika dolar digunakan untuk mendukung mandat Kongo sebagai ketua blok Uni Afrika (Nyabiage 2021). Penguatan hubungan Tiongkok dan Kongo merupakan langkah penting karena mendukung stabilitas jalur suplai mineral yang menjadi kebutuhan industri dalam negeri Tiongkok.

Pada tahun 2022, Republik Demokratik Kongo menerima investasi sebesar sekitar 5,15 miliar dolar AS yang berasal dari berbagai sektor ekonomi. Sektor jasa menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 44,8%, diikuti oleh industri mineral sebesar 40,7%. Pada periode yang sama, Tiongkok muncul sebagai penyumbang investasi asing langsung terbesar dengan nilai mencapai 2,87 miliar dolar AS (Lloyds Bank 2024). Dalam upaya menjaga stabilitas devisa dan meminimalkan risiko defisit neraca pembayaran, kehadiran Tiongkok dipandang sebagai investor strategis bagi Kongo. Ketergantungan ini semakin terlihat pada tahun 2023 ketika total stok FDI mencapai sekitar 32,62 miliar dolar AS atau setara dengan 48,5% dari PDB nasional. Selanjutnya, pada tahun 2024 kedua negara kembali menyepakati investasi senilai sekitar 7 miliar dolar AS untuk proyek infrastruktur dan pertambangan yang melibatkan perusahaan Zijin Mining (Reuters 2024).

Grafik 3. 3 FDI Sebagai Penyumbang PDB Kongo



Sumber: GlobalEconomy (2023)

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan kontribusi investasi asing langsung (FDI) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Republik Demokratik Kongo selama periode 2018–2023. Pada tahun 2018, kontribusi FDI terhadap PDB tercatat sebesar 2,96%, kemudian mengalami penurunan menjadi 2,61% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, kontribusi tersebut kembali meningkat hingga mencapai 3,08% dan relatif stabil pada tahun 2021 dengan nilai 3,03%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 2,14%. Kondisi ini kemudian berbalik pada tahun 2023, ketika kontribusi FDI meningkat tajam hingga mencapai 3,54%, yang menjadi nilai tertinggi dalam periode tersebut (GlobalEconomy 2023). Data ini menunjukkan bahwa arus investasi asing di Kongo cenderung fluktuatif, tetapi tetap memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hubungan antara Republik Demokratik Kongo dan investasi asing langsung yang berasal dari Tiongkok mencerminkan kesesuaian dengan kerangka teori Ketergantungan Baru yang dikemukakan oleh Theotonio Dos Santos. Dalam konteks ini, arus investasi asing tidak sepenuhnya berperan sebagai pendorong

kemandirian ekonomi domestik, melainkan cenderung memperkuat posisi Kongo dalam sistem ekonomi global sebagai pemasok utama bahan mentah bagi negara yang memiliki kapasitas industri lebih maju. Pola hubungan tersebut tercermin dari upaya Kongo dalam menutup defisit ekonomi melalui penerimaan pinjaman atau kerja sama pertambangan untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang didukung oleh pinjaman eksternal lebih mencerminkan solusi jangka pendek, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap pengelolaan sumber daya dan kemandirian ekonomi nasional (Santos 1970).

3.2 Monopoli Teknologi oleh Tiongkok Sebagai Negara Imperialis

Dalam menjalankan industri dalam negeri, negara periferi mengalami ketergantungan pada teknologi negara inti demi berjalannya ekonomi negara. Santos menekankan bahwa negara-negara periferi mungkin mengalami pertumbuhan industri, tetapi industri tersebut bergantung dengan proses teknis dan manajerial yang ditentukan oleh pusat-pusat kapitalis. Teknologi digunakan bukan hanya sekedar alat, melainkan instrumen untuk mentransfer surplus ekonomi dari periferi ke pusat melalui biaya lisensi, impor mesin, dan kontrol atas inovasi (Santos 1970).

Bentuk ketergantungan baru ini hadir dalam struktur produksi domestik negara periferi melalui FDI. Industrialisasi dalam negeri Kongo tidak akan berkembang hingga saat ini jika tidak ada campur tangan Tiongkok. Mesin-mesin canggih Tiongkok dikirim sebagai fondasi berjalannya ekonomi Kongo, mirisnya kontrol atas teknologi tersebut tetap berada pada pihak Tiongkok. Negara periferi seperti Kongo hanya berfungsi sebagai ruang fisik untuk operasional teknologi

asing, sementara kepemilikan dan operasional tetap ditangan Tiongkok. Sehingga pembangunan di negara tertinggal hanyalah gambaran dari ekspansi kebutuhan industri negara inti, bukan hasil pertumbuhan mandiri (Santos 1970).

Ketidakmampuan dalam teknologi industri di Kongo saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang yang diakibatkan oleh konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik. Setelah Perang Kongo pertama dan kedua, baik infrastruktur maupun industri mengalami kehancuran. Meskipun terdapat upaya dalam merekonstruksi ekonomi, Kongo mengalami permasalahan yang krusial (Center for Preventive Action 2025). Di mana negara ini tidak memiliki kapasitas teknologi yang memadai dalam mengelola industri pertambangan secara mandiri. Kesenjangan antara sumber daya dan teknologi ini menciptakan ruang bagi kekuatan eksternal, khususnya Tiongkok untuk hadir baik sebagai penyedia modal, pasar komoditas, dan teknologi.

Kondisi pasca konflik menyebabkan Kongo untuk mengandalkan teknologi industri modern melalui investasi asing, guna memulihkan produktivitas industri dalam negeri. Akibatnya, pemulihan sektor pertambangan tidak berlangsung melalui pengembangan industri teknologi domestik secara mandiri, melainkan mendatangkan teknologi asing yang terikat pada struktur ekonomi eksternal (Tour é 2025). Meskipun memiliki sumberdaya mineral yang melimpah, Kongo tidak memiliki kapasitas alat-alat produksi mineral secara mandiri. Ketiadaan manufaktur ini menciptakan kegagalan transformasi dari sektor primer menjadi sektor sekunder, sehingga kebutuhan industri seperti suku cadang, mesin berat, dan teknologi pengolahan mineral bergantung pada impor.

Ketidakmampuan dalam memproduksi teknologi pertambangan, membuat perusahaan nasional seperti Gécamines kehilangan peran sebagai aktor operasional dan menjadi sekedar entitas administratif yang memegang saham minoritas dalam berbagai usaha patungan dengan Tiongkok, seperti Sicominex, Tenke Fungurume Mine, dan Kinsafu Mine (Osaji *et al.* 2025). Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan hambatan masuk bagi pengusaha domestik maupun investor asing lainnya untuk menguasai sektor strategis. Sehingga, kendali atas kekayaan alam Kongo secara nyata berpindah ke tangan pemilik teknologi yaitu Tiongkok.

Salah satu keunggulan investasi yang ditawarkan oleh Tiongkok dengan mengirimkan teknologi yang dibutuhkan bagi industri mineral Kongo. Data perdagangan tahun 2023 menunjukkan bahwa impor utama Kongo dari Tiongkok mencakup mesin pemrosesan, truk, struktur besi, dan peralatan listrik yang esensial bagi operasional tambang (WITS 2023). Ketergantungan ini menyebabkan Kongo terjebak pada pasokan mesin dari Tiongkok, tanpa adanya pasokan ini Kongo tidak dapat mengoperasikan industri-industri mineral strategis dan akan menyebabkan proyek-proyek besar seperti Sicominex dan Kamoa-Kakula akan terhenti karena ketiadaan alternatif suku cadang.

Pola impor tersebut menunjukkan dominasi produk teknologi Tiongkok yang telah menguasai pasar industri pertambangan lokal Kongo. Penggunaan peralatan Tiongkok seringkali diberikan melalui persyaratan investasi, di mana Perusahaan Tiongkok membawa seluruh paket teknologi mulai dari manajemen, ahli pertambangan, survei geologi, teknisi pemeliharaan, dan alat berat (Touré 2025). Selain itu, Tiongkok telah mendominasi sekitar 90% pasar kendaraan pertambangan di Kongo, yang digunakan untuk menekan biaya produksi (Caixin ,

Guoping, *and* Jia 2024). Hal ini menciptakan ketergantungan yang sulit diputus bagi Kongo, karena seluruh infrastruktur yang terdapat pada pertambangan terpasang menggunakan standar teknis Tiongkok.

Dominasi teknologi yang digunakan pada sektor pertambangan Kongo hadir sebagai bentuk investasi Tiongkok, sehingga Kongo tidak memiliki akses dalam memperoleh teknologi tersebut secara bebas. Teknologi tersebut dibawa melalui perusahaan-perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Kongo yang menyebabkan akses dan pengendaliannya berada di tangan Tiongkok. Pengoperasian teknologi pertambangan juga ditempati oleh insinyur-insinyur Tiongkok, sehingga peluang pekerja lokal untuk mengembangkan keterampilan dalam mengoperasikan teknologi tersebut terbatas (Touré 2025).

Dalam kerja sama pertambangan menunjukkan bahwa mekanisme alih teknologi tidak secara tegas dijadikan sebagai kewajiban yang mengikat dalam kontrak investasi besar. Dalam perjanjian Sicomines Agreement antara Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo, ketentuan Pasal 14.1.4 memberikan keleluasaan bagi pihak Tiongkok untuk menentukan sendiri pemasok teknologi, peralatan, serta jasa yang digunakan dalam proyek tersebut. Selain itu, Pasal 11.2 juga memberikan prioritas kepada pasar Tiongkok untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan domestik Kongo. Ketentuan tersebut secara tidak langsung membatasi peluang perusahaan lokal untuk terlibat dalam segmen rantai nilai yang memiliki tingkat teknologi lebih tinggi. Akibatnya, proses transfer pengetahuan yang terjadi cenderung bersifat terbatas dan tidak berkembang secara substantial (Joost 2020). Kondisi ini menggambarkan bahwa investasi Tiongkok cenderung mempertahankan kontrol atas teknologi yang dimilikinya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh China Africa Research Initiative (CARI), jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok yang bekerja di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2024 tercatat sebagai yang terbesar kedua di kawasan Afrika. Pada tahun tersebut, sekitar 9.694 pekerja Tiongkok tercatat bekerja di berbagai sektor ekonomi, terutama pada sektor manufaktur serta sejumlah sektor industri lainnya (CARI 2025). Tingginya jumlah tenaga kerja asing tersebut menunjukkan semakin kuatnya keterlibatan perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam aktivitas ekonomi dan industri di Kongo. Akibatnya, kemampuan Kongo dalam mengembangkan industri mineral secara mandiri menjadi terhambat dan semakin bergantung dengan teknologi yang dibawa oleh perusahaan Tiongkok.

Ketiadaan alih teknologi dalam hubungan investasi antara Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo menunjukkan pola ketergantungan teknologi sebagaimana dijelaskan dalam teori ketergantungan oleh Theotonio Dos Santos. Dalam kerangka ini, negara inti mempertahankan dominasi ekonomi dengan memonopoli penguasaan teknologi dan membatasi akses negara pinggiran terhadap inovasi teknis. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan kontraktual pada Sicomines Agreement yang memberikan keleluasaan kepada pihak Tiongkok untuk menentukan pemasok teknologi, peralatan, serta jasa yang digunakan dalam proyek pertambangan. Selain itu, prioritas terhadap pasar Tiongkok dalam penyediaan barang dan jasa secara tidak langsung membatasi keterlibatan perusahaan domestik Kongo dalam bagian rantai nilai yang memiliki tingkat teknologi lebih tinggi. Akibatnya, proses transfer teknologi yang seharusnya menjadi salah satu manfaat utama investasi asing tidak berkembang secara signifikan dan hanya terjadi secara terbatas pada level operasional dasar (Santos 1970).

Dominasi teknologi tersebut juga diperkuat oleh struktur tenaga kerja dalam proyek-proyek industri yang dikendalikan oleh perusahaan Tiongkok. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 9.694 tenaga kerja asal Tiongkok yang bekerja di Kongo, sebagian besar menempati posisi teknis, ahli, dan manajerial. Sementara itu, pekerja lokal umumnya ditempatkan pada pekerjaan berkeahlian rendah melalui sistem subkontrak yang membatasi akses mereka terhadap pelatihan teknis yang lebih mendalam. Hambatan tambahan seperti penggunaan bahasa Mandarin dalam manual operasional serta sistem pengendalian mesin juga mempersempit peluang teknisi lokal untuk memahami dan menguasai teknologi yang digunakan. Kondisi ini menyebabkan teknologi yang dibawa melalui investasi Tiongkok tetap berada di bawah kontrol eksklusif perusahaan asing, sehingga industri pertambangan Kongo tidak memperoleh kapasitas teknologi yang memadai untuk mengembangkan sektor tersebut secara mandiri. Dalam jangka panjang, situasi ini memperkuat posisi Kongo sebagai pemasok bahan mentah dalam rantai nilai global, sementara penguasaan teknologi dan nilai tambah ekonomi tetap terkonsentrasi pada aktor eksternal (Santos 1970).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hubungan Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok pada sektor pertambangan periode 2020 hingga 2025 membentuk pola ketergantungan struktural yang dapat dijelaskan melalui teori ketergantungan baru Theotonio Dos Santos. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan Kongo dengan Tiongkok merupakan relasi yang bersifat asimetris dan mencerminkan tiga bentuk ketergantungan baru sebagaimana yang dikemukakan oleh Santos, yaitu ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, ketergantungan terhadap investasi asing akibat defisit struktural, serta ketergantungan pada monopoli teknologi yang dikuasai oleh negara inti.

Pertama, ketergantungan Kongo pada ekspor komoditas mentah terbukti membentuk struktur ekonomi yang tidak mandiri. Kongo merupakan produsen kobalt terbesar di dunia dengan kontribusi mencapai 72,1% cadangan kobalt global, namun kekayaan mineral tersebut tidak dikonversi menjadi kemakmuran domestik. Ekspor mineral mentah menjadi satu-satunya sumber utama devisa negara, sementara nilai tambah dari komoditas tersebut sepenuhnya dinikmati oleh aktor eksternal, terutama perusahaan-perusahaan Tiongkok. Kondisi ini sejalan dengan argumen Santos bahwa negara tertinggal terjebak sebagai pemasok bahan baku bagi industri negara inti, sehingga menghambat transformasi struktural ekonomi domestik. Ketergantungan ini diperburuk oleh peran oligarki dalam pemerintahan

Kongo, di mana rezim Kabila secara sistematis melanggengkan industri ekstraktif melalui praktik korupsi dan manipulasi perjanjian pertambangan seperti Sicominex. Meskipun pemerintahan Tshisekedi berhasil merenegosiasi perjanjian tersebut dengan komitmen infrastruktur sebesar 5,5 miliar dolar Amerika, model pembangunan ini tetap sepenuhnya bertumpu pada pendapatan mineral, sehingga setiap fluktuasi harga kobalt di pasar global secara langsung mengguncang stabilitas ekonomi nasional Kongo.

Kedua, ketergantungan Kongo terhadap investasi asing yang dipicu oleh defisit struktural terbukti menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Santos menjelaskan bahwa defisit pada neraca pembayaran negara tertinggal disebabkan oleh tiga faktor, yakni struktur pasar internasional yang monopolistik, dominasi modal asing pada sektor ekspor unggulan, dan ketergantungan pada pendanaan asing untuk menutup defisit. Ketiga faktor ini terbukti hadir dalam konteks Kongo. Penurunan harga kobalt global hingga 60% pada tahun 2023 yang berlanjut hingga mencapai titik terendah 10 dolar per pon pada Februari 2025 membuktikan bagaimana struktur pasar yang dikuasai oleh perusahaan Tiongkok merugikan Kongo. Tiongkok menguasai lebih dari 60% produksi kobalt dan sekitar 80% kapasitas pemurnian kobalt global, sehingga mampu memengaruhi harga komoditas di pasar internasional. Dominasi 15 dari 19 perusahaan pertambangan di Kongo oleh Tiongkok menyebabkan repatriasi keuntungan yang besar ke negara asal investor. Akibatnya, meskipun nilai ekspor mineral terus meningkat, Kongo tetap mengalami defisit yang mendorong penumpukan utang luar negeri hingga mencapai 11,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2023, di mana sekitar 3,2 miliar dolar di antaranya merupakan utang kepada Tiongkok. Kondisi ini membuktikan

bahwa investasi asing tidak memutus ketergantungan, melainkan memperdalam siklus defisit sebagaimana yang diprediksikan oleh teori Santos.

Ketiga, monopoli teknologi oleh Tiongkok dalam industri pertambangan Kongo terbukti menjadi instrumen utama yang mengunci posisi Kongo sebagai negara periferi. Santos menyatakan bahwa negara inti mempertahankan dominasinya dengan memonopoli teknologi dan hanya menyalurkannya melalui mekanisme investasi, lisensi, atau royalti. Dalam konteks Kongo, ketentuan Pasal 14.1.4 dan Pasal 11.2 *Sicomines Agreement* memberikan keleluasaan kepada Tiongkok untuk menentukan sendiri pemasok teknologi dan memprioritaskan pasar Tiongkok dalam seluruh rantai nilai pertambangan. Akibatnya, tidak ada alih teknologi yang signifikan kepada tenaga kerja lokal Kongo. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 9.694 pekerja asal Tiongkok yang menempati posisi teknis dan manajerial di Kongo, sementara tenaga kerja lokal hanya ditempatkan pada pekerjaan berkeahlian rendah. Dominasi Tiongkok juga mencakup sekitar 90% pasar kendaraan pertambangan di Kongo, sehingga seluruh infrastruktur industri terpasang menggunakan standar teknis Tiongkok. Kondisi ini menyebabkan Kongo tidak mampu mengembangkan kapasitas teknologi secara mandiri dan tetap bergantung pada impor mesin serta peralatan dari Tiongkok untuk mengoperasikan industri pertambangannya.

Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan bilateral antara Kongo dan Tiongkok pada periode 2020 hingga 2025 merupakan manifestasi nyata dari ketergantungan baru sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh Santos. Kongo tidak sekadar bergantung pada Tiongkok dalam aspek perdagangan, melainkan terjebak dalam struktur ketergantungan yang bersifat menyeluruh, mulai dari

penentuan harga komoditas, penguasaan modal dan keuntungan pertambangan, hingga monopoli teknologi industri. Kebijakan moratorium ekspor kobalt yang diterapkan Kongo sejak Februari 2025 sebagai upaya untuk memperbaiki posisi tawar di pasar global justru memperlihatkan betapa dalamnya ketergantungan tersebut, karena langkah tersebut berdampak langsung pada ketidakpastian pasokan industri baterai Tiongkok yang kemudian beralih ke teknologi alternatif. Kondisi ini membuktikan bahwa posisi Kongo dalam sistem ekonomi global masih tetap berada pada posisi subordinat sebagai pemasok bahan mentah, jauh dari cita-cita transformasi industri yang mandiri. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa teori ketergantungan baru Santos dapat menjelaskan dinamika relasi ekonomi antara negara tertinggal dan negara inti di era kontemporer, khususnya dalam konteks ekspansi investasi Tiongkok di Kongo.

4.2 Rekomendasi

Dalam melihat ketergantungan terhadap komoditas mentah, peneliti menyarankan agar kajian ketergantungan ekonomi tidak hanya dilihat pada negara berkembang. Akan tetapi, diperluas ke negara maju yang masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap ekspor komoditas mentah, dengan mengambil studi kasus Australia. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, karena berbeda dari negara maju yang telah beralih ke industrialisasi berbasis teknologi dan jasa bernilai tambah tinggi, Australia saat ini mengalami ketergantungan ekonomi pada komoditas mineral mentah. Sehingga penulis menyarankan penelitian selanjutnya dapat menelaah mengapa ketergantungan tersebut justru tidak menghambat stabilitas

ekonomi Australia, serta bagaimana kerangka institusional, tata kelola, dan posisi Australia dalam rantai nilai global yang membedakannya dari negara berkembang. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang variasi bentuk ketergantungan dalam sistem ekonomi global dan menguji kembali relevansi teori ketergantungan dalam konteks negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

- African Development Bank. 2025. "Democratic Republic of Congo Economic Outlook." African Development Bank - Building Today, a Better Africa Tomorrow. December 2025. <https://www.afdb.org/en/countries-central-africa-democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-economic-outlook>.
- Alonso, Elisa, Amanda S. Brioché, Ruth F. Schult, Loyd M. Trimmer, Ji-Eun Kim, Andrew L. Gulley, and David G. Pineult. 2025. *World Minerals Outlook—Cobalt, Gallium, Helium, Lithium, Magnesium, Palladium, Platinum, and Titanium through 2029*. Ver 1.1. USGS Science for a Changing World .
- Altıparmak, Suleyman O, Keith Waters, Cameron G Thies, and Shade T Shuttles. 2025. "Cornering the Market with Foreign Direct Investments: China's Cobalt Politics." *Renewable and Sustainable Energy Transition* 7 (June): 2–7. <https://doi.org/10.1016/j.rset.2025.100113>.
- ASA. 2026. "DRC: Strategic Minerals, Political Hardening, and the High-Risk Architecture of Global Resource Competition | African Security Analysis." [Africansecurityanalysis.com](https://www.africansecurityanalysis.com). January 16, 2026. <https://www.africansecurityanalysis.com/reports/drc-strategic-minerals-political-hardening-and-the-high-risk-architecture-of-global-resource-competition>.
- Barman, Pranjal, Lachit Dutta, Sushanta Bordoloi, Anamika Kalita, Pronamika Buragohain, Swapna Bharali, and Brian Azzopardi. 2023. "Renewable Energy Integration with Electric Vehicle Technology: A Review of the Existing Smart Charging Approaches." *Renewable and Sustainable Energy*

Reviews 183 (September): 113518.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113518>.

Bloomberg . 2024. “Booming EV Di China: Pertanda Masa Depan Suram Pasar BBM Dunia - Energi.” *Bloombergtechnoz.com*. Bloomberg Technoz. November 28, 2024. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/56224/booming-ev-di-china-pertanda-masa-depan-suram-pasar-bbm-dunia/2>.

Bociaga, Robert. 2022. “Minerals and China’s Military Assistance in the DR Congo.” *Thediplomat.com*. October 31, 2022. <https://thediplomat.com/2022/10/minerals-and-chinas-military-assistance-in-the-dr-congo/>.

Caixin , Luo Guoping, and Denise Jia. 2024. “China Digs in to Boost Mining in Democratic Republic of Congo.” *ThinkChina - Big Reads, Opinion & Columns on China*. Think China. November 22, 2024. <https://www.thinkchina.sg/economy/china-digs-boost-mining-democratic-republic-congo>.

CARI. 2025. “Data: Chinese Workers in Africa.” China Africa Research Initiative. 2025. <https://www.sais-cari.org/data-chinese-workers-in-africa>.

Cavanagh, Michael J, and William Clowes. 2021. “China Cash Flowed through Congo Bank to Former President’s Cronies.” *Bloomberg.com*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/features/2021-11-28/africa-s-biggest-data-leak-reveals-china-money-role-in-kabila-s-congo-looting?embedded-checkout=true>.

- Center for Preventive Action. 2025. "Conflict in the Democratic Republic of Congo." Global Conflict Tracker. Council on Foreign Relations. June 9, 2025. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-democratic-republic-congo>.
- CIDOB. 2023. "Appendix. The Economic Presence of China in the Global South (Trade and Investment)." CIDOB . November 2023. <https://www.cidob.org/en/publications/appendix-economic-presence-china-global-south-trade-and-investment>.
- Clowes, William , and Michael Kavanagh. 2021. "Document Leak Shows Kabila Family, Associates Looted DRC Funds." Wwww.aljazeera.com. November 19, 2021. <https://www.aljazeera.com/economy/2021/11/19/document-leak-shows-kabila-family-associates-looted-drc-funds>.
- Cordell, Dennis D, René Lemarchand, Bernd Michael Wiese, and Ntsomo Payanzo. 2019. "Democratic Republic of the Congo - Political Process | Britannica." In *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/Political-process>.
- Creswell, Jhon W, and Cheryl N Poth. 2023. *Qualitative Inquiry and Research Design*. 5th ed. SAGE Publications.
- CRI. 2024. "China and Many African Countries Announce New Positions on Bilateral Relations." Indonesian.cri.cn. China Radio International. September 3, 2024. <https://indonesian.cri.cn/2024/09/03/ARTIN0J0gZna0C6qmcUogaP6240903.shtml>.

- Dewi, Fransiska. 2025. "RI Rawan Gagal Cuan Dari Kobalt Saat Kongo Moratorium Ekspor - Energi." Bloombergtechnoz.com. Bloomberg Technoz. May 15, 2025. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/71307/ri-rawan-gagal-cuan-dari-kobalt-saat-kongo-moratorium-ekspor/2>.
- Dollar, David. 2019. "Understanding China's Belt and Road Infrastructure Projects in Africa." Brookings. September 2019. <https://www.brookings.edu/articles/understanding-chinas-belt-and-road-infrastructure-projects-in-africa/>.
- Endaylalu, Gashaw Ayferam. 2018. "China in Africa: A Partner or Patron Ethiopia in Focus." *International Relations and Diplomacy* 6 (6): 325–32. <https://doi.org/10.17265/2328-2134/2018.06.002>.
- Freitas, Marcus Vinicius de. 2023. "The Impact of Chinese Investments in Africa: Neocolonialism or Cooperation?" *Policy Brief* 30 (23): 1–10.
- GlobalEconomy. 2023. "Democratic Republic of the Congo Foreign Direct Investment, Percent of GDP ." TheGlobalEconomy.com. December 2023. https://www.theglobaleconomy.com/Democratic-Republic-of-the-Congo/Foreign_Direct_Investment/.
- . 2024. "Democratic Republic of the Congo Exports, Percent of GDP ." TheGlobalEconomy.com. December 2024. <https://www.theglobaleconomy.com/Democratic-Republic-of-the-Congo/exports/>.
- Gregory, Farrell, and Paul J Milas. 2024. "China in the Democratic Republic of the Congo: A New Dynamic in Critical Mineral Procurement." US Army War

College - Strategic Studies Institute. SSI. October 17, 2024.
<https://ssi.armywarcollege.edu/SSI-Media/Recent-Publications/Article/3938204/china-in-the-democratic-republic-of-the-congo-a-new-dynamic-in-critical-mineral/>.

Home, Andy. 2025. "Congo's Attempt to Control Cobalt Market Risks Becoming Supply Shock." *Reuters*, December 3, 2025.
<https://www.reuters.com/markets/commodities/congos-attempt-control-cobalt-market-risks-becoming-supply-shock-2025-12-03/>.

Houenou, Aurel Sèdjro . 2025. "DRC: Audit Reveals \$16.8 Billion in Underreported Mining Revenues between 2018 and 2023." Edited by Ange Jason Quenum. Ecofin Agency. October 9, 2025.
<https://www.ecofinagency.com/news-industry/0910-49438-drc-audit-flags-16-8-billion-mining-revenue-shortfall-between-2018-and-2023>.

Insight Forward. 2025. "COMPETITION for COBALT -the Geopolitics of a Critical Mineral." [insightforward.co.uk](https://www.insightforward.co.uk): InsightForward.
<https://www.insightforward.co.uk/wp-content/uploads/go-x/u/27893ea8-11e1-406c-a987-cb250314c745/Cobalt-Competition-Final.pdf>.

International Trade Administration. 2026. "Democratic Republic of the Congo - Market Overview." [Www.trade.gov](http://www.trade.gov). February 20, 2026.
<https://www.trade.gov/country-commercial-guides/democratic-republic-congo-market-overview>.

Jansson, Johanna. 2011. "The Sicomines Agreement: Change and Continuity in the Democratic Republic of Congo's International Relations." *SIIIA Occasional Paper*. South African Institute of International Affairs:

- Johannesburg. <https://forskning.ruc.dk/en/publications/the-sicomines-agreement-change-and-continuity-in-the-democratic-r/>.
- Joost, Justin Monsenepwo. 2020. "Technology Transfer in China-Africa Trade Relations." *Max Planck Institute*. China Law and Development.
- Kurniawan, Anto . 2023. "40 Negara Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Dunia, Ada Tetangga Indonesia ." SINDOnews Ekbis. July 21, 2023. <https://ekbis.sindonews.com/read/1164327/34/40-negara-dengan-tingkat-kemiskinan-tertinggi-di-dunia-ada-tetangga-indonesia-1690783642/46>.
- Lawal, Shola. 2024. "China-Africa Summit 2024: What's in It for Beijing, Xi Jinping and Africa?" Al Jazeera. Al Jazeera. September 4, 2024. <https://www.aljazeera.com/news/2024/9/4/china-africa-summit-2024-whats-in-it-for-beijing-and-for-africa>.
- LloydsBank. 2024. "Foreign Direct Investment (FDI) in the Democratic Republic of Congo ." Wwww.lloydsbanktrade.com. December 2024. <https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/democratic-republic-of-congo/investment>.
- LUFT TIME. 2024. "Republik Demokratik Kongo Tingkat Pengangguran | LUFT TIME." Luft.co.jp. December 2024. <https://time.luft.co.jp/id/economy/africa/congo-democratic-republic/unemployment-rate>.
- Macrotrends. 2025. "Democratic Republic of Congo External Debt 1970-2025 | MacroTrends." Macrotrends.net. January 2025. <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/COD/democratic-republic-of-congo/external-debt-stock>.

Miles, matthew B, and A Michael Hubberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*.
2th ed. UK: Sage Publication.

Mondal, Monika. 2024. “What Does a Changing Cobalt Market Mean for the
DRC?” Dialogue Earth. May 15, 2024.
[https://dialogue.earth/en/business/what-does-a-changing-cobalt-market-
mean-for-the-democratic-republic-of-the-congo/](https://dialogue.earth/en/business/what-does-a-changing-cobalt-market-mean-for-the-democratic-republic-of-the-congo/).

Mukoko, Pierre. 2024. “DRC: Sicomines to Spend \$5.5B on Infrastructure
Development between 2024 and 2040.” Bankable.africa. BANKABLE.
October 10, 2024. [https://bankable.africa/en/news/1010-380-drc-
sicomines-to-spend-5-5b-on-infrastructure-development-between-2024-
and-2040](https://bankable.africa/en/news/1010-380-drc-sicomines-to-spend-5-5b-on-infrastructure-development-between-2024-and-2040).

Nazar, Halim. 2021. “Chinese Mining in the DRC: From Sicomines to Global
Cobalt Monopoly.” ICS Research Blog. August 27, 2021.
[https://icsin.org/blogs/2021/08/27/chinese-mining-in-the-drc-from-
sicomines-to-global-cobalt-monopoly/](https://icsin.org/blogs/2021/08/27/chinese-mining-in-the-drc-from-sicomines-to-global-cobalt-monopoly/).

Nyabiage, Jevans. 2021a. “China Cancels Democratic Republic of Congo Loans as
It Joins Belt and Road.” South China Morning Post. myNEWS. January 7,
2021.
[https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3116837/china-
cancels-democratic-republic-congo-loans-it-joins-
belt?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article](https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3116837/china-cancels-democratic-republic-congo-loans-it-joins-belt?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article).

———. 2021b. “China Cancels Democratic Republic of Congo Loans as It Joins
Belt and Road.” South China Morning Post. myNEWS. January 7, 2021.
<https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3116837/china->

cancels-democratic-republic-congo-loans-it-joins
belt?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article.

OECD. 2024. "Democratic Republic of the Congo (COD) Exports, Imports, and Trade Partners | the Observatory of Economic Complexity." The Observatory of Economic Complexity. December 2024. <https://oec.world/en/profile/country/cod?selector359id=HS4&selector345id=2023>.

Osaji, Prince, Luca Girodon, Keith Pemberton, Mateo Bodon, and Ty Kushi. 2025. "Democratic Republic of Congo: Expansion of Chinese-Owned Cobalt and Copper Mines in the Lualaba Province." Washington, DC: National Geospatial-Intelligence Agency. <https://doi.org/10.63836/pxvc-010m>.

Rahayu, Anik Setyani . 2024. "Kenaikan Air Laut: Penjelasan Dan Bantahan Yang Menyebutnya Bohong Halaman 1 - Kompasiana.com." KOMPASIANA. Kompasiana.com. September 25, 2024. <https://www.kompasiana.com/aniksetyani3309/66f3a4d934777c0a5e362b82/kenaikan-air-laut-penjelasan-dan-bantahan-yang-menyebutnya-bohong>.

Reuters. 2024. "Chinese Companies to Invest up to \$7 Billion in Congo Mining Infrastructure." Reuters. January 27, 2024. <https://www.reuters.com/markets/commodities/chinese-invest-up-7-bln-congo-mining-infrastructure-statement-2024-01-27/>.

———. 2025a. "Congo Extends Cobalt Export Ban by Three Months." *Reuters*, June 21, 2025. <https://www.reuters.com/world/africa/congo-extends-cobalt-export-ban-by-three-months-2025-06-21/>.

- Reuters . 2025b. “Chinese Users Turn to Off-Exchange Congolese Copper to Ease Supply Tightness.” *Reuters*, March 12, 2025. <https://www.reuters.com/markets/commodities/chinese-users-turn-off-exchange-congolese-copper-ease-supply-tightness-2025-03-12/>.
- Ross, Aaron, and Helen Reid. 2021. “Congo’s \$6 Bln China Mining Deal ‘Unconscionable’, Says Draft Report.” *Reuters*. Reuters. <https://www.reuters.com/business/congos-6-bln-china-mining-deal-unconscionable-says-draft-report-2021-10-08/>.
- S&P Global. 2025. “Democratic Republic of Congo ‘B-/B’ Ratings Affir | S&P Global Ratings.” Spglobal.com. January 24, 2025. <https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/13395696>.
- Santos, Theotonio Dos. 1970. “The Structure of Dependence.” *The American Economic Review* 60 (2): 231–36. <https://www.jstor.org/stable/1815811>.
- SMM. 2025. “DRC Suspends Cobalt Exports for Four Months.” Metal.com. Sanghai Metal Market. February 25, 2025. <https://www.metal.com/id/newscontent/103195440>.
- Touré, Amina. 2025. “Can Chinese Investment in Africa Drive Economic Growth and Improve Social Conditions? A Case Study of China’s Partnership with the Democratic Republic of Congo’s Mining Industry.” *Growthinktank.org*. Generation for Rights Over the World. <https://www.growthinktank.org/en/can-chinese-investment-in-africa-drive-economic-growth-and-improve-social-conditions-a-case-study-of-chinas-partnership-with-the-democratic-republic-of-congos-mining-industry/>.

- Utama, Denta, Mohamad Rosyidin, and Fendy Eko Wahyudi. 2022. "Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt Dalam Kerjasama Pertambangan Kongo Dan Tiongkok." *Journal of International Relations* 8 (4): 1001–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi..>
- WITS. 2023. "China Product Exports and Imports to Congo, Dem. Rep. 2023 ." Worldbank.org. December 2023. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2023/TradeFlow/EXPIMP/Partner/ZAR/Product/all-groups>.
- World Bank. 2025. "Democratic Republic of Congo Overview." World Bank. World Bank Group. January 10, 2025. <https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview>.
- Yoshida, Yeni Herliana. 2022. "Ketergantungan Laos Pada Tiongkok Dalam Ekonomi Dan Pembangunan Sebagai Penghambat Terlaksananya Program Reduce Inequality." *Indonesian Journal of International Relations* 6 (2): 67–84. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.298>.
- Zhao, Changying, Shenghong Ju, Yuan Xue, Tao Ren, Ya Ji, and Xue Chen. 2022. "China's Energy Transitions for Carbon Neutrality: Challenges and Opportunities." *Carbon Neutrality* 1 (7): 2–3. <https://doi.org/10.1007/s43979-022-00010-y>.
- Zhen, Han. 2025. "As Conflict Escalates in Eastern Congo, China's Mining Giants Confront New Risks far from the Front Lines." The China Global South Project. November 26, 2025. <https://chinaglobalsouth.com/2025/11/26/chinese-mining-risks-congo-conflict-escalation/>.